

**LAPORAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP BERDASARKAN
PSAK 16 TAHUN 2015 PADA PT ANGKASA PURA I (PERSERO)
CABANG JUANDA**

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat
guna memperoleh sebutan Ahli Madya (A.Md.)
Akuntansi



Disusun Oleh:
RATIH SEPTANES PUTRI
NIM: 041310113072

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2016**



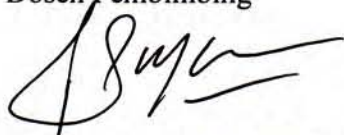
LAPORAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP BERDASARKAN
PSAK 16 TAHUN 2015 PADA PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) CABANG
JUANDA

Disusun oleh:
RATIH SEPTANES PUTRI
NIM: 041310113072

Telah disetujui dan diterima dengan baik

Dosen Pembimbing



Santi Novita, S.E., MM., Ak., BKP., CA

NIP: 197311072005012001

Tanggal 2 Juni 2016



Amalia Rizki, S.E., M.Si., Ak.

NIP: 197604122003122003

Tanggal 6/6/2016

Accounting Section Head
PT. Angkasa Pura 1 (Persero) Juanda

Angkasa Pura AIRPORTS

BANDARA INTI JUANDA

Joel Siahaan

NIP. 0676040-J

Tanggal 2 Juni 2016

ORISINALITAS
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Saya (Ratih Septanes Putri, 041310113072), menyatakan bahwa :

1. Laporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarisme) dari karya orang lain.
2. Dalam laporan Praktik Kerja Lapangan ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan mata kuliah yang telah lulus karena karya tulis ini, serta sanksi-sanksi lain sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 18 Mei 2016



Ratih Septanes Putri
(041310113072)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Lapangan ini dengan sebaik-baiknya.

Laporan Praktek Kerja Lapangan ini disusun sebagai syarat kelulusan guna memperoleh sebutan Ahli Madya di program studi Akuntansi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Selain itu, laporan ini digunakan untuk melengkapi praktek kerja yang telah dilaksanakan lebih kurang satu bulan di PT. Angkasa Pura 1 (Persero) Bandar Udara Juanda Surabaya.

Laporan Praktek Kerja Lapangan ini dapat diselesaikan tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan masukan-masukan kepada penulis. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Dr. H. Widi Hidayat, M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Prof. Dr. Dian Agustia, SE., M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
3. Amalia Rizki, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi yang telah memberikan informasi tentang praktik kerja lapangan.
4. Santi Novita, S.E., MM.,Ak.,BKP.,CA., selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dan masukan yang berarti.
5. Dra. Isnalita, M.Si.,Ak., selaku dosen wali yang selalu memberikan nasehat dan motivasi.
6. Seluruh pihak pengajar dan pihak akademi yang turut membantu dan membimbing selama perkuliahan di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga
7. Bapak Didik selaku *Shared Service Departement Head* yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Juanda serta untuk

seluruh staff *Accounting and Information* dan untuk seluruh staff *Human Capital* yang telah membantu penulis selama kegiatan PKL.

8. Mama dan Papa, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya. Kalian orang terbaik yang selalu menjadi alasan untuk terus berjuang sampai saat ini. Terima kasih untuk seluruh kasih sayangnya.
9. Mas sama Mbak yang tidak henti-hentinya menginspirasi dan memotivasi, meski kadang bikin resek. Jangan pernah kapok ngasih tahu adiknya.
10. Adek tersayang vonie yang juga partner sekamar kos, makasih ya tidak bosan mengingatkan untuk mengerjakan laporan ini dan ngasih pinjaman laptopnya di akhir-akhir penyelesaian laporan.
11. Anita dan Andradea, teman awal maba sampe akhirnya jadi partner PKL makasih cewek-cewek super teledor sudah nemenin dari pengajuan ke perusahaan sampai penyelesaian pengerjaan laporan ini. Thanksss banget saran masukannya juga ketidakseronohannya.
12. Teman preian, Vincent, Ruth, Cece, Andradea, Anita, Riris, Didi, Indro, Dimas, Harun, Embek, Magres, juga Aldy thanks guys buat kebodohan sama kegilaannya kalian bikin betah di kampus juga touring piknik kecil yang bikin kangen!
13. Teman-teman HIMA AKS0 khususnya Kabinet Amreta yang memberikan banyak pengalaman bersosial dan berorganisasi dan juga ospek jurusan roadcamp yang super asik, terimakasih!
14. Teman-teman AKS0 2013 yang sama-sama berjuang buat wisuda, thanks tiga tahunnya. See you on top rek!

Akhir kata dengan segala keterbatasan yang ada, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Surabaya, 29 Mei 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR KTM.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Teori	4
1.2.1 Pengertian Aset Tetap	4
1.2.2 Klasifikasi Aset Tetap.....	5
1.2.3 Pengukuran Saat Pengakuan Aset Tetap	7
1.2.4 Perolehan Aset Tetap	10
1.2.5 Pengukuran Setelah Biaya Perolehan	15
1.2.6 Depresiasi Aset Tetap	20
1.2.7 Revaluasi Aset Tetap	24
1.2.8 Penurunan Aset Tetap.....	25
1.2.9 Penghentian Atas Pelepasan Aset Tetap	27
1.2.10 Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap	28
1.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan.....	29
1.4 Manfaat Praktik Kerja Lapangan	29
1.4.1 Bagi Mahasiswa	29
1.4.2 Bagi PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Juanda	30
1.4.3 Bagi Pembaca	30
1.5 Rencana Kegiatan Praktik Kerja Lapangan.....	31

BAB 2 PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

2.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	33
2.1.1 Sejarah.....	33
2.1.2 Visi Perusahaan.....	35
2.1.3 Misi Perusahaan.....	35
2.1.4 Logo Perusahaan.....	36
2.1.5 Nilai Budaya Perusahaan.....	36
2.1.6 Bidang Usaha.....	37
2.1.7 Struktur Organisasi.....	38
2.1.8 Lima Arah Strategis.....	42
2.1.9 Anak Perusahaan.....	43
2.2 Perlakuan Akuntansi Aset Tetap PT Angkasa Pura I (Persero).....	44
2.2.1 Pengertian dan Penggolongan Akuntansi.....	44
2.2.2 Pengakuan Awal Aset Tetap.....	45
2.2.3 Perolehan Aset Tetap.....	46
2.2.4 Pengukuran Setelah Pengakuan.....	50
2.2.5 Depresiasi Aset Tetap.....	51
2.2.6 Revaluasi Aset Tetap.....	53
2.2.7 Penurunan Nilai Aset Tetap.....	53
2.2.8 Penghentian Aset Tetap.....	53
2.2.9 Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap.....	54
2.3 Pembahasan.....	55
2.3.1 Pengakuan Awal Aset Tetap.....	55
2.3.2 Perolehan Aset Tetap.....	55
2.3.3 Pengukuran setelah pengakuan.....	56
2.3.4 Depresiasi Aset Tetap.....	57
2.3.5 Revaluasi Aset Tetap.....	57
2.3.6 Penurunan Nilai.....	58
2.3.7 Penghentian Pengakuan Aset Tetap.....	58
2.3.8 Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap Dalam Laporan Keuangan ..	59

BAB 3 SIMPULAN DAN SARAN

3.1 Simpulan	60
3.2 Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Laporan Posisi Keuangan PT. Angkasa Pura 1 (Persero).....	3
Tabel 1.2	Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan.....	32
Tabel 2.1	Kelompok Aset Tetap Berdasarkan Umur Ekonomis.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Logo Perusahaan.....	36.
Gambar 2.2	Struktur Organisasi Perusahaan.....	39
Gambar 2.3	Lima arah strategis perusahaan.....	42

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Persetujuan Judul Praktik Kerja Lapangan
- Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan
- Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Praktik Kerja Lapangan
- Lampiran 4 Laporan Posisi Keuangan 2015
- Lampiran 5 Laporan Laba Rugi 2015
- Lampiran 6 Rincian Kelompok Aset dan Umur Ekonomis
- Lampiran 7 Rekapitulasi Aset Tetap
- Lampiran 8 Contoh biaya yang dapat dikaitkan
- Lampiran 9 Pencatatan Ayat Jurnal
- Lampiran 10 BAST (Berita Acara Serah Terima)

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdirinya sebuah perusahaan tak luput karena adanya tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan tersebut adalah untuk memperoleh laba dari hasil kegiatan operasional perusahaan serta adanya keinginan pemilik perusahaan untuk menciptakan lapangan pekerjaan sehingga mampu mengurangi pengangguran. Tujuan itulah yang akan menjadi visi dan misi perusahaan, sehingga mampu menggerakkan para pelaku usaha untuk melaksanakan dan mencapai target yang diinginkan. Dalam pencapaian target tersebut tentu diperlukan strategi dan usaha yang maksimal.

Langkah dalam pencapaian tujuan perusahaan berdasar pada keputusan yang diambil oleh manajemen. Proses pengambilan keputusan tersebut dibutuhkan data dan informasi yang handal, terpercaya dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga kualitas dari keputusan yang dihasilkan tidak diragukan. Salah satu data dan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen adalah laporan keuangan perusahaan.

Laporan keuangan merupakan catatan informasi yang menggambarkan kinerja dan posisi keuangan, serta arus kas perusahaan pada periode tertentu sehingga bermanfaat bagi pengguna eksternal perusahaan seperti pemegang saham, pemerintah dan masyarakat umum. Selain itu, digunakan juga oleh manajemen sebagai acuan untuk menentukan strategi bisnis perusahaan serta membuat rencana anggaran tahun berikutnya. Oleh karena pentingnya informasi yang terkandung dalam laporan keuangan, maka perlu perhatian khusus dalam penyusunannya. Di Indonesia, laporan keuangan disusun berdasarkan pedoman yang dibuat oleh IAI yaitu, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Aset tetap merupakan salah satu komponen penting dalam laporan keuangan karena jumlahnya yang material, sehingga mempengaruhi cukup signifikan dalam penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Penilaian,

pengukuran dan penyajian aset tetap dalam laporan keuangan harus mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16 Tahun 2015. Menurut PSAK Nomer 16 paragraf 06 Tahun 2015, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diperoleh untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Setiap perusahaan baik yang bergerak dalam bidang jasa, perdagangan, maupun industri pasti memiliki aset tetap untuk mendukung dalam kegiatan operasional perusahaan.

PT. Angkasa Pura 1 (Persero) adalah sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memberikan pelayanan lalu lintas udara dan bisnis bandar udara di Indonesia, yang menitik beratkan pelayanan pada kawasan Indonesia bagian tengah dan kawasan Indonesia bagian timur. Perusahaan ini mengatur dan mengoperasikan 13 bandar udara di Indonesia, termasuk diantaranya adalah Bandar Udara Internasional Juanda yang dikelola oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Juanda. Berdasarkan padatnya pergerakan pesawat dan jumlah penumpang, Bandara Internasional Juanda merupakan bandar udara terbesar kedua di Indonesia setelah Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.

Bidang usaha yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) adalah pelayanan jasa yang terbagi dua, yaitu jasa aeronautika dan jasa non-aeronautika. Dalam mendukung proses pelayanan jasa aeronautika, digunakan landasan lapangan (*runway*) untuk Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PPPPU) serta fasilitas-fasilitas di gedung Terminal 1 (T1) dan Terminal 2 (T2) guna memberikan kenyamanan kepada penumpang. Sedangkan dalam proses jasa non-aeronautika, digunakan lapangan parkir untuk mendukung kebutuhan penumpang serta ruang-ruang dalam Terminal 1 dan Terminal 2 yang disewakan untuk toko perbelanjaan kebutuhan penumpang. Oleh karena itu, aset tetap berperan langsung terhadap perolehan pendapatan perusahaan sehingga merupakan komponen penting bagi PT. Angkasa Pura I (Persero) dalam mendukung proses kegiatan operasionalnya.

Posisi aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan berjumlah sangat material. Total nilai bersih aset tetap untuk tahun 2015 yaitu senilai Rp 2.263.874.259.561 ini menunjukkan 92% dari total aset perusahaan.

Tabel 1.1
PT. Angkasa Pura 1 (Persero) Bandara Juanda Surabaya
Laporan Posisi Keuangan

ASET	2.448.705.932.793	LIABILITAS DAN EKUITAS	2.448.705.932.793
Aset Lancar	164.857.119.715	Liabilitas jangka pendek	175.665.521.987
Aset Tidak Lancar	2.323.848.813.078	Liabilitas jangka panjang	18.841.944.111
Total Properti investasi	59.974.553.517	Ekuitas	464.040.334.214
Total Aset Tetap	2.263.874.259.561		

Sumber: data internal PT. Angkasa Pura 1 (Persero) Cabang Bandar Udara Juanda

Tingginya nilai aset tetap yang dimiliki, berpengaruh terhadap nilai depresiasi yang akan dibebankan setiap tahunnya. Pembebanan ini akan berpengaruh terhadap laba atau rugi perusahaan periode berjalan. Sehingga perlu diperhitungkan dengan benar untuk beban depresiasi setiap aset tetap. Selain itu, pengukuran nilai aset tetap dalam laporan keuangan perlu disajikan secara wajar, terlebih untuk nilai tanah yang nilainya selalu naik hampir setiap tahun.

Berdasarkan uraian di atas dan mengingat pentingnya penilaian, pengukuran dan penyajian aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan secara wajar, maka sangat perlu untuk mengetahui perlakuan akuntansi terhadap aset tetap yang diterapkan pada PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Juanda. Untuk itu, dalam Tugas Akhir judul yang dimiliki adalah "Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK 16 Tahun 2015 pada PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Juanda".

1.2 Landasan Teori

1.2.1 Pengertian Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diperoleh untuk digunakan selama lebih dari satu periode (PSAK No.16 paragraf 06 Tahun 2015). Sedangkan menurut pendapat Warren, et al. (2014:406) aset tetap adalah aset jangka panjang atau yang relatif permanen seperti peralatan, mesin, bangunan dan tanah. Aset tetap memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu ada secara fisik, dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam operasi normal, dan tidak untuk dijual sebagai bagian dari operasi normal.

Aset tetap adalah barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan serta bukan untuk diperjualbelikan (Rudianto, 2012:256).

Pendapat lain juga mengemukakan, properti, gedung, dan peralatan adalah harta berwujud yang ditahan untuk digunakan dalam produksi atau persediaan barang dan jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrasi; digunakan lebih dari satu periode (Kieso, et al., 2011:512). Karakteristik aset tetap adalah:

- 1) Digunakan dalam operasi dan bukan untuk dijual kembali.
- 2) Bersifat jangka panjang dan umumnya mengalami depresiasi.
- 3) Memiliki substansi fisik.

Menurut Rizal Effendi (2013:233) aset tetap adalah aset yang dimiliki (bisa dibuat sendiri, dibeli baik tunai maupun, dari hasil pertukaran dengan aset yang lain atau diperoleh dari sumbangan dan hadiah) dan tidak untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan, nilainya relatif tinggi, umumnya lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan dalam kegiatan perusahaan.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa aset tetap adalah

1. Merupakan aset berwujud.
2. Memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun.
3. Digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan.

4. Memiliki nilai material, harga dari aset cukup signifikan misalnya seperti: harga tanah, harga mesin, harga bangunan dan lain sebagainya.
5. Tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan.
6. Dimiliki Perusahaan.

1.2.2 Klasifikasi Aset Tetap

Klasifikasi aset tetap dilakukan karena adanya perbedaan sifat aset yang satu dengan yang lain. Setiap benda berwujud yang termasuk dalam karakteristik sebagai aset tetap, memiliki fungsi dan umur ekonomis yang berbeda-beda. Beragamnya kriteria aset tetap tersebut, maka perlu untuk dilakukan pengelompokan lebih lanjut. Pada umumnya, semakin banyak aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin banyak pula penggolongannya. Oleh karena itu, penggolongan aset tetap tergantung pada kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh entitas masing-masing.

Aset tetap yang dimiliki perusahaan terdiri dari berbagai jenis dan bentuk, tergantung pada sifat dan bidang usaha yang ditekuni oleh masing-masing perusahaan tersebut. Aset tetap merupakan bagian utama dari aset perusahaan dengan nilai yang sangat material oleh karena itu, cukup memberikan pengaruh yang signifikan dalam penyajian laporan keuangan. Nilai yang relatif besar serta jenis dan bentuk yang beragam dari aset tetap menyebabkan perusahaan harus hati-hati dalam menggolongkannya.

Aset tetap dapat berupa kendaraan, mesin, bangunan, tanah, dan sebagainya. Dari berbagai jenis aset tetap yang dimiliki perusahaan, untuk tujuan akuntansi dapat digolongkan ke dalam:

1. Sudut substansi aset tetap:
 - a. *Tangible Assets* atau aset berwujud seperti lahan, mesin, gedung, dan peralatan.
 - b. *Intangible Assets* atau aset tidak berwujud seperti Goodwill, Patent, Copyright, Hak Cipta, Franchise dan lain-lain.

2. Aset Tetap Disusutkan atau tidak disusutkan

- a. *Depreciated Plant Assets* yaitu aset tetap yang dapat disusutkan seperti bangunan, peralatan, mesin, inventaris, dan lain-lain.
- b. *Undepreciated Plant Assets* yaitu aktiva tetap yang tidak disusutkan seperti tanah.

3. Aset Tetap Berdasarkan Jenisnya

a. Tanah

Tanah adalah bidang terhampar baik tempat bangunan maupun yang masih kosong. Dalam akuntansi apabila ada tanah yang didirikan bangunan di atasnya harus dipisahkan pencatatannya dari tanah itu sendiri.

b. Bangunan

Bangunan adalah gedung yang pencatatannya harus terpisah dari tanah yang menjadi tempat lokasi berdirinya bangunan tersebut.

c. Mesin

Mesin termasuk peralatan-peralatan yang menjadi komponen/bagian dari mesin tersebut.

d. Kendaraan

Semua jenis kendaraan seperti alat pengangkut, truk, grader, traktor, forklift, mobil, kendaraan bermotor dan lain-lain.

e. Perabot

Dalam jenis ini termasuk perabotan kantor, perabot laboratorium, perabot pabrik yang merupakan isi dari suatu bangunan

f. Inventaris

Peralatan yang dianggap merupakan alat-alat besar yang digunakan dalam perusahaan seperti inventaris kantor, inventaris pabrik, inventaris laboratorium, inventaris gudang dan lain-lain.

g. Prasarana

Prasarana seperti jalan akses, jembatan, pagar dan lain-lain.

Menurut PSAK No. 16 Paragraf 37 Tahun 2015, suatu kelas aset tetap adalah pengelompokan aset-aset yang memiliki sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi entitas. Berikut adalah contoh dari kelas tersendiri:

- a) Tanah
- b) Tanah dan bangunan
- c) Mesin
- d) Kapal
- e) Pesawat udara
- f) Kendaraan bermotor
- g) Perabotan
- h) Peralatan kantor

1.2.3 Pengukuran Saat Pengakuan Aset Tetap

Dalam memperoleh aset tetap, perusahaan harus mengeluarkan sejumlah uang yang tidak hanya dipakai untuk membayar barang itu sendiri sesuai yang tercantum di dalam faktur, tetapi juga untuk beban pengiriman, pemasangan, perantara, balik nama dan sebagainya. Keseluruhan uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut disebut dengan biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau, jika dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK lain (PSAK No.16 Paragraf 06 Tahun 2015).

Pengakuan biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut; dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal (PSAK No. 16 Paragraf 07 Tahun 2015). Suku cadang, peralatan siap pakai dan peralatan pemeliharaan diakui sesuai dengan pernyataan ini ketika memenuhi definisi dari aset tetap. Namun, jika tidak maka suku cadang peralatan pemeliharaan diklasifikasikan sebagai persediaan (PSAK No. 16

Paragraf 08 Tahun 2015). Berdasarkan PSAK No.16 Paragraf 16 Tahun 2015, elemen biaya perolehan aset tetap meliputi :

- a) Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon dan potongan lain.
- b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen.
- c) Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tertentu.

Contoh biaya yang dapat di atribusikan secara langsung adalah:

- a) Biaya imbalan kerja yang timbul secara langsung dari konstruksi atau perolehan aset tetap;
- b) Biaya penyiapan lahan untuk pabrik;
- c) Biaya penanganan dan penyerahan awal;
- d) Biaya instalasi dan perakitan;
- e) Biaya pengujian aset apakah aset berfungsi dengan baik, setelah dikurangi hasil neto penjualan setiap produk yang dihasilkan sehubungan dengan pengujian tersebut (seperti contoh hasil dari peralatan yang sedang diuji); dan
- f) *Fee* profesional.

Contoh biaya yang bukan merupakan biaya perolehan aset tetap adalah:

- a) Biaya pembukaan fasilitas baru;
- b) Biaya pengenalan produk atau jasa baru (termasuk biaya iklan dan aktivitas promosi);
- c) Biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau kelas pelanggan baru (termasuk biaya pelatihan staf);
- d) Biaya administrasi dan biaya *overhead* umum lain

Menurut Kieso, et al. (2011:513) identifikasi biaya untuk dimasukkan ke dalam biaya perolehan awal properti, gedung, dan peralatan, adalah:

a) Biaya Tanah

- 1) Harga pembelian;
- 2) biaya penutup, seperti hak tanah, biaya notaris, dan biaya pencatatan;
- 3) Biaya penilaian, pengisian, pengaliran, dan pembersihan;
- 4) Asumsi mengenai hak gadai, hipotek, atau beban properti; dan
- 5) Tambahan pengembangan tanah yang memiliki masa guna yang tidak menentu.

b) Biaya Bangunan

Termasuk semua biaya yang terkait secara langsung dengan akuisisi atau konstruksi. Biaya mencakup:

- (1) bahan, tenaga kerja, dan biaya tambahan yang muncul selama konstruksi, dan
- (2) ongkos professional dan izin mendirikan bangunan

c) Biaya Peralatan

Termasuk semua biaya yang muncul untuk pengadaan peralatan dan penyiapannya untuk digunakan. Biaya ini mencakup:

- 1) Harga pembelian,
- 2) Ongkos pengangkutan dan penanganan
- 3) Asuransi peralatan selama penghantaran,
- 4) Biaya dasar khusus jika diperlukan,
- 5) Biaya perakitan dan instalasi, dan
- 6) Biaya uji coba.

1.2.4 Perolehan Aset Tetap

Aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, masing-masing cara perolehan tersebut akan mempengaruhi penentuan harga perolehan dan penilaian aset tetap. Cara perolehan aset tetap antara lain:

1. Pembelian tunai

Aset tetap berwujud yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan. Dalam jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap termasuk semua biaya yang dikeluarkan agar aset tetap tersebut siap untuk dipakai, seperti biaya angkut, premi asuransi dalam perjalanan, biaya balik nama, biaya pemasangan dan biaya percobaan. Semua biaya-biaya di atas dikapitalisasi sebagai harga perolehan aset tetap. Apabila dalam pembelian aset tetap ada potongan tunai, maka potongan tunai tersebut merupakan pengurangan terhadap harga faktur. Biaya perolehan aset tetap adalah setara harga tunai pada tanggal pengakuan. Jika pembayaran ditangguhkan melampaui jangka waktu kredit normal, maka perbedaan antara harga tunai dan total pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit kecuali beban bunga tersebut dikapitalisasi sesuai dengan PSAK 26: *Biaya Pinjaman* (PSAK No. 16 paragraf 23 Tahun 2015).

2. Pembelian secara *Lumpsum*/Gabungan

Apabila dalam suatu pembelian diperoleh lebih dari satu macam aset tetap maka harga perolehan harus dialokasikan pada masing-masing aset tetap. Misalnya dalam pembelian gedung beserta tanahnya maka harga perolehan dialokasikan untuk gedung dan tanah. Dasar alokasi yang digunakan sedapat mungkin dilakukan dengan harga pasar relatif masing-masing aset, yaitu dalam hal pembelian tanah dan gedung, dicari harga pasar tanah dan harga pasar gedung, masing-masing harga pasar ini dibandingkan dan menjadi dasar alokasi harga perolehan. Apabila harga pasar masing-masing aset tidak diketahui, alokasi harga perolehan dapat dilakukan dengan menggunakan dasar surat bukti pembayaran pajak (misalnya pajak bumi dan bangunan).

Jika tidak ada dasar yang dapat digunakan untuk alokasi harga perolehan maka alokasinya didasarkan pada putusan pimpinan perusahaan.

3. Pembelian angsuran

Apabila aset tetap diperoleh dari pembelian angsuran, maka dalam harga perolehan aset tetap tersebut tidak termasuk bunga. Bunga selama masa angsuran harus dibebankan sebagai beban bunga periode akuntansi berjalan. Sedangkan yang dihitung sebagai harga perolehan adalah total angsuran ditambah beban tambahan seperti beban pengiriman, bea balik nama, beban pemasangan, dan lain-lain.

4. Pertukaran aset non-moneter

Menurut Kieso, et al. (2011: 521) perusahaan harus mencatat properti, gedung, dan peralatan yaitu pada fair value dari apa yang diserahkan atau pada fair value dari aset yang diterima. Perusahaan harus menunjukkan dengan segera keuntungan atau kerugian pertukaran ketika transaksi memiliki substansi komersial.

Menurut PSAK N0. 16 Paragraf 24 Tahun 2015, satu atau lebih aset tetap mungkin diperoleh dalam pertukaran dengan aset moneter atau aset non moneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter. Pembahasan berikut mengacu pada pertukaran satu aset nonmoneter dengan aset nonmoneter lain, tetapi hal ini juga berlaku untuk seluruh pertukaran yang dideskripsikan dalam kalimat sebelumnya. Biaya perolehan aset tetap tersebut diukur pada nilai wajar kecuali:

- a) Transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau:
- b) Nilai wajar aset yang diterima dan aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

Aset yang diperoleh diukur dengan cara tersebut bahkan jika entitas tidak dapat segera menghentikan pengakuan aset yang diserahkan. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur pada nilai wajar, maka biaya perolehannya diukur pada jumlah tercatat aset yang diserahkan.

Entitas menentukan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial dengan mempertimbangkan sejauh mana kas masa depan yang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:

- a) Konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) arus kas dari aset yang diterima berbeda dengan konfigurasi arus kas dari aset yang diserahkan, atau
- b) Nilai spesifik entitas dari bagian operasi entitas yang terpengaruh oleh transaksi berubah sebagai akibat dari pertukaran; dan
- c) Selisih di a) atau b) adalah relatif signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.

1. Pertukaran – Situasi Kerugian

Perusahaan mengakui kerugian segera baik pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak.

Peralatanbaru	xxx	
Akumulasi depresiasi—Peralatan	xxx	
Kerugian penjualan Peralatan	xxx	
Peralatan lama		xxx
Kas		xxx

2. Pertukaran - Situasi Menguntungkan

a. Memiliki Substansi Komersial

Perusahaan mencatat biaya aset non-moneter yang diperoleh dalam pertukaran untuk aset non-moneter lainnya pada fair value aset yang diserahkan, dan segera memperoleh keuntungan.

Contoh jurnal untuk pertukaran ini adalah:

Truck baru	xxx	
Akumulasi depresiasi—Truck	xxx	
Truck lama		xxx
Keuntungan penjualan truk bekas		xxx
Kas		xxx

b. Kekurangan Substansi Komersial

Pertukaran kekurangan substansi komersial yaitu, posisi ekonomis entitas tidak berubah secara signifikan sebagai hasil dari pertukaran ini. Dalam hal ini, keuntungan ditangguhkan dan mengurangi nilai aset yang baru.

Contoh jurnal:

Truck Baru	xxx
Akumulasi depresiasi—Truck	xxx
Truck lama	xxx
Kas	xxx

5. Menerbitkan surat berharga

Aset tetap yang diperoleh dengan cara ditukar dengan saham atau obligasi, dicatat sebesar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukar. Apabila harga pasar saham atau obligasi tidak diketahui, harga perolehan aset tetap ditentukan sebesar harga pasar aset tetap tersebut. Jika harga pasar surat berharga dan aset tetap yang ditukar kedua-duanya tidak diketahui, dalam keadaan seperti ini nilai pertukaran ditentukan oleh keputusan pemimpin perusahaan. Nilai pertukaran ini dipakai sebagai dasar pencatatan harga perolehan aset tetap dan nilai-nilai surat-surat berharga yang dikeluarkan

6. Diperoleh dari sumbangan / donasi Pemerintah

Dana bantuan atau sumbangan merupakan bantuan yang diterima dari pemerintah dalam bentuk transfer sumber daya ke perusahaan dan imbalannya dipenuhi pada kondisi tertentu terkait dengan aktivitas operasi perusahaan. Dana bantuan dimasukkan ke dalam pendapatan (pendekatan pendapatan) pada basis sistematis yang menyesuaikannya dengan biaya terkait yang hendak digantikan.

7. Perolehan dengan membangun sendiri

Menurut PSAK No. 16 Paragraf 22 Tahun 2015, biaya perolehan suatu aset yang dikonstruksi sendiri ditentukan dengan menggunakan prinsip yang sama sebagaimana aset yang diperoleh bukan dengan konstruksi sendiri. Jika entitas membuat aset serupa untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, biaya perolehan aset biasanya sama dengan biaya konstruksi aset untuk dijual (lihat PSAK 14: persediaan). Oleh karena itu, dalam menetapkan biaya perolehan maka setiap laba internal dieliminasi. Serupa dengan hal tersebut, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja, atau sumber daya lain dalam aset yang dikonstruksi sendiri tidak termasuk biaya perolehan aset tersebut.

Biaya perolehan aset tetap adalah setara harga tunai pada tanggal pengakuan. Jika pembayaran ditangguhkan melampaui jangka waktu kredit normal, maka perbedaan antara harga tunai dan total pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit kecuali beban bunga tersebut dikapitalisasi sesuai dengan PSAK 26: *Biaya Pinjaman* (PSAK No. 16 paragraf 23).

8. Perolehan dengan cara sewa guna usaha (*Lease*)

Leasing adalah perjanjian kontraktual antara *lessor* dan *lessee* yang memberikan hak kepada *lessee* untuk menggunakan suatu aset yang dimiliki oleh *lessor* selama periode waktu tertentu dan sebagai imbalannya, *lessee* melakukan pembayaran kepada *lessor* yang pada umumnya dilakukan secara periodik. Durasi (jangka waktu lease) dapat bervariasi dari periode waktu yang pendek hingga seluruh umur manfaat dari aset yang bersangkutan. Sewa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sewa pembiayaan (*capital lease atau financing lease*) dan sewa operasi (*operating lease*)

- a) *Capital lease/financing lease* atau sewa pembiayaan yaitu suatu jenis leasing yang memenuhi salah satu atau lebih dari syarat-syarat berikut ini :
- 1) Adanya transfer kepemilikan aset yang disewakan pada akhir masa sewa;
 - 2) Adanya opsi bargain purchase;
 - 3) Jangka waktu sewa adalah 75% atau lebih dari umur ekonomis aset yang disewa;
 - 4) Nilai kini awal sewa dari pembayaran sewa minimum adalah 90% atau lebih dari harga pasar.

Pada *financial leases*, kepemilikan aset berpindah dari *lessor* menjadi ke *lessee*. Pengaruh *financial leases* muncul pada laporan laba rugi, berupa biaya bunga dan biaya depresiasi, dan laporan neraca berupa peningkatan nilai aset tetap dan peningkatan hutang (*liabilities*).

- b) *Operating lease* atau sewa operasi, yaitu transaksi sewa menyewa pada umumnya dan jangka waktu sewanya lebih pendek dari pada umur ekonomis propertinya. *Lessee* biasanya tidak mempunyai hak membeli pada waktu kontrak sewa berakhir sehingga tidak terjadi perpindahan hak milik barang. Kontrak sewa ini bersifat *cancelable* yaitu dapat diputuskan pihak *lessee* sewaktu-waktu atau sebelum masa kontrak berakhir. Pengaruh *operating lease* hanya muncul pada laporan laba rugi dimana *lessee* mencatatkan biaya sewa. Sedangkan kepemilikan aset masih berada pada *lessor*.

1.2.5 Pengukuran Setelah Biaya Perolehan

Perusahaan menilai aset tetap pada periode berikutnya dengan menggunakan salah satu metode biaya (*cost method*) atau Metode Revaluasi (*fair value method*). Perusahaan dapat menggunakan metode biaya atau metode revaluasi untuk seluruh jenis aset tetap atau hanya untuk satu jenis aset tetap saja.

1. Metode Biaya (*Cost Method*)

Setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi rugi penurunan nilai (PSAK No. 16 Paragraf 30 Tahun 2015). Metode biaya banyak digunakan oleh perusahaan karena dengan menggunakan metode ini tidak dibutuhkan biaya untuk melakukan penilaian kembali terhadap aset tetap, sehingga mampu mengurangi pengeluaran.

2. Metode Revaluasi (*Fair Value Method*)

Setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan (PSAK No. 16 Paragraf 31 Tahun 2015). Metode revaluasi umumnya mampu menaikkan nilai aset tetap, sehingga berpengaruh pada kenaikan beban depresiasi aset tersebut. Jika beban depresiasinya tinggi, maka laba bersih yang dihasilkan pada periode tersebut menjadi lebih rendah.

Pada saat adanya pengeluaran untuk aset tetap, perusahaan perlu untuk memutuskan apakah akan melaporkannya sebagai pengeluaran modal (*Capital Expenditure*) atau pengeluaran pendapatan (*Revenue Expenditure*).

A. Pengeluaran Modal (*Capital Expenditure*)

Pengeluaran modal (*capital expenditure*) adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aset tetap sehingga mampu meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas produktif aset tetap, serta memperpanjang masa manfaatnya. Biaya-biaya ini biasanya dikeluarkan dalam jumlah yang cukup besar (material), namun tidak sering terjadi.

Pengeluaran modal tidak dibebankan langsung sebagai beban dalam laporan laba rugi, melainkan dikapitalisasi terlebih dahulu sebagai aset tetap dineraca, karena pengeluaran-pengeluaran ini akan memberikan manfaat bagi perusahaan di masa mendatang. Pengeluaran-pengeluaran dalam kategori ini akan dicatat dengan cara mendebet akun aset tetap terkait. Nantinya, secara periodik dan sistematis, bagian dari harga perolehan aktiva tetap ini akan dialokasikan menjadi beban depresiasi untuk masing-masing periode yang menerima manfaat atas pengeluaran modal tadi.

B. Pengeluaran pendapatan (*Revenue Expenditure*)

Pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*) adalah pengeluaran untuk biaya-biaya yang akan memberi manfaat hanya dalam periode berjalan, sehingga pengeluaran tersebut tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap di neraca, melainkan akan langsung dibebankan sebagai beban dalam laporan laba rugi periode berjalan dimana biaya tersebut terjadi (dikeluarkan). Contoh dari pengeluaran ini adalah beban untuk pemeliharaan dan perbaikan aset tetap.

Pada umumnya terdapat empat jenis pengeluaran yang relatif besar terhadap aset tetap yang ada, yaitu:

1) Penambahan (*Addition*)

Penambahan adalah jenis pengeluaran aset yang mampu memperbesar atau memperluas fasilitas aset tersebut. Apabila alat tambahan itu dipasang menjadi satu dengan mesin maka biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan memasang alat tersebut merupakan suatu penambahan. Biaya-biaya yang timbul dalam penambahan dikapitalisasi sehingga menambah harga perolehan aset dan didepresiasi selama umur ekonomisnya.

2) Perbaikan dan Penggantian (*Improvements and Replacements*)

Perbaikan adalah penggantian suatu aset dengan aset yang baru untuk memperoleh kegunaan yang lebih besar. Perbaikan yang biayanya kecil dapat diperlakukan seperti reparasi biasa, tetapi perbaikan yang memakan biaya besar dicatat sebagai aset baru. Aset lama yang diganti dan akumulasi depresiasinya dihapuskan dari rekening- rekeningnya

Penggantian adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengganti aset atau suatu bagian aset dengan unit yang baru yang tipenya sama. Penggantian seperti ini biasanya terjadi karena aset lama sudah tidak berfungsi kembali (rusak). Menurut PSAK No. 16 Paragraf 13 Tahun 2015, bagian tertentu aset tetap dapat mensyaratkan penggantian secara periodik. Sebagai contoh, tungku pembakaran mensyaratkan penggantian lapisannya setelah digunakan selama sejumlah jam tertentu, atau interior pesawat terbang seperti tempat duduk dan dapur perlu diperbaharui beberapa kali selama umur rangka pesawat. Entitas dapat melakukan penggantian yang tidak terlalu sering atas aset tetap yang diperoleh, seperti mengganti dinding interior bangunan, atau melakukan penggantian yang tidak berulang. Sesuai dengan prinsip pengakuan di paragraf 07, entitas mengakui biaya penggantian komponen aset tetap dalam jumlah tercatat aset tetap ketika biaya tersebut terjadi jika pengeluaran tersebut memenuhi kriteria pengakuan.

3) Reorganisasi dan Penataan Ulang (*Rearrangement and Reorganization*)

Berdasarkan PSAK No. 16 Paragraf 20, pengakuan biaya dalam jumlah tercatat aset tetap dihentikan ketika aset tetap tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Oleh karena itu, biaya pemakaian dan pengembangan aset tidak dimasukkan dalam jumlah tercatat aset tersebut. Sebagai contoh, biaya berikut ini tidak termasuk dalam jumlah tercatat aset tetap:

- a Biaya yang terjadi ketika aset telah mampu beroperasi sesuai dengan intensi manajemen namun belum digunakan atau masih beroperasi dibawah kapasitas penuh;
- b Kerugian awal operasi, seperti ketika permintaan terhadap *output* masih rendah; dan
- c Biaya relokasi atau reorganisasi sebagian atau seluruh operasi entitas. Jadi biaya reorganisasi dan penataan ulang aset tetap tidak dikapitalisasi tetapi dibebankan pada periode tersebut.

4) Reparasi dan Pemeliharaan

Biaya reparasi merupakan biaya yang jumlahnya kecil jika reparasinya biasa dan jumlahnya cukup besar jika reparasi besar.

a Reparasi kecil

Reparasi kecil merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memelihara aset agar tetap dalam kondisi yang baik. Entitas tidak mengakui biaya perawatan sehari-hari aset tetap sebagai bagian dari aset tetap tersebut. Sebaliknya, biaya tersebut diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari terutama terdiri dari biaya tenaga kerja dan bahan habis pakai termasuk suku cadang kecil. Tujuan pengeluaran ini sering dideskripsikan sebagai “perbaikan dan pemeliharaan” aset tetap (PSAK No.16 Paragraf 12)

b Reparasi besar

Reparasi besar yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menaikkan nilai kegunaan aset dan tidak menambah umurnya. Reparasi besar biasanya terjadi selang beberapa tahun, sehingga dapat dikatakan bahwa manfaat reparasi seperti ini akan dirasakan dalam beberapa periode. Oleh karena itu biaya reparasi besar dikapitalisasi dan pembebanannya sebagai biaya dilakukan dalam periode-periode yang menerima manfaat. Terdapat dua cara untuk mencatat reparasi besar, yaitu :

1. Menambah harga perolehan aset tetap, apabila biaya dikeluarkan untuk menaikkan nilai kegunaan aset dan tidak menambah nilai umurnya.
2. Mengurangi akumulasi depresiasi, apabila biaya dikeluarkan untuk memperpanjang umur aset tetap dan mungkin juga nilai residunya.

1.2.6 Depresiasi Aset Tetap

1) Definisi Depresiasi Aset Tetap

Setelah aset tetap diperoleh, aset tetap tersebut akan digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan operasional dan produksinya. Dalam fase ini, ada beberapa perlakuan akuntansi terhadap aset tetap perusahaan, salah satunya adalah depresiasi aset tetap.

Depresiasi adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Nilai residu aset adalah jumlah estimasi yang dapat diperoleh entitas saat ini dari pelepasan aset, setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan, jika aset telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan pada akhir umur manfaatnya. Jumlah tersusutkan adalah biaya perolehan aset, atau jumlah lain yang merupakan pengganti biaya perolehan, dikurangi nilai residunya (PSAK No 16 Paragraf 06 Tahun 2015).

Depresiasi suatu aset dimulai ketika aset siap untuk digunakan, yaitu ketika aset berada pada lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Depresiasi aset dihentikan lebih awal ketika aset tersebut diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual. Oleh karena itu, depresiasi tidak dihentikan pengakuannya ketika aset tidak digunakan, kecuali telah habis disusutkan. Akan tetapi, jika metode yang digunakan adalah metode pemakaian (seperti metode unit produksi), maka metode depresiasi menjadi nol ketika tidak ada produksi.

2) Faktor Faktor Depresiasi Aktiva Tetap

Menurut Kieso, et al. (2011: 563) faktor – faktor yang terlibat dalam depresiasi adalah:

1. Dasar Depresiasi Aset

Dasar dalam depresiasi aset adalah dengan menggunakan dua faktor, yaitu nilai perolehan dan nilai sisa. Maka dalam perhitungannya, dasar depresiasi adalah total dari selisih nilai perolehan dan nilai sisa.

2. Estimasi Umur Manfaat

Umur manfaat aset ditentukan berdasarkan kegunaan yang diperkirakan oleh entitas. Kebijakan manajemen aset dari entitas mencakup pelepasan aset setelah jangka waktu tertentu atau setelah pemakaian sejumlah proporsi tertentu dari manfaat ekonomik masa depan aset. Oleh karena itu, umur manfaat aset dapat lebih pendek daripada umur ekonomik aset tersebut. Manfaat ekonomik masa depan suatu aset dipakai oleh entitas terutama melalui penggunaannya. Akan tetapi, beberapa faktor lain dapat mengakibatkan menurunnya manfaat ekonomik yang dapat diperoleh dari aset tersebut. Sebagai konsekuensinya, seluruh faktor ini diperhitungkan dalam menentukan umur manfaat suatu aset, yaitu perkiraan daya pakai, perkiraan tingkat keausan fisik yang bergantung pada perawatan dan pemeliharaan ketika aset tidak digunakan, keusangan teknis yang timbul dari perubahan atau peningkatan produksi, dan pembatasan hukum (PSAK No.16 Paragraf 56).

Sedangkan menurut Kieso, et al. (2011: 556) terdapat dua alasan faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kemampuan aset tetap, yaitu: faktor fisik (*physical factors*) dan faktor ekonomi atau faktor fungsional(*economic or functional factors*)

a Faktor Fisik (*Physical Factors*)

Faktor fisik ini seperti kerusakan dan berakhirnya umur manfaat suatu aset tetap.

b Faktor Ekonomi atau Faktor Fungsional (*Economic or Functional Factors*)

Faktor ekonomi atau faktor fungsional ini seperti aset tetap yang telah usang dan sudah tidak dapat untuk digunakan kembali (Kieso, et al., 2011:56)

3) Metode Perhitungan Depresiasi

Metode depresiasi yang digunakan mencerminkan pola pemakaian manfaat ekonomik masa depan aset yang diharapkan oleh entitas. Berbagai metode depresiasi antara lain adalah metode garis lurus, metode saldo menurun berganda dan metode unit produksi. Metode garis lurus menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Metode saldo menurun menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Metode unit produksi menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diperkirakan dari aset. Entitas memilih metode yang paling mencerminkan pola pemakaian yang diperkirakan atas manfaat ekonomik masa depan aset. Metode tersebut diterapkan secara konsisten dari periode ke periode, kecuali terdapat perubahan dalam pola pemakaian manfaat ekonomik masa depan yang diperkirakan aset tersebut (PSAK No. 16 Paragraf 62 Tahun 2015).

a **Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*)**

Metode ini adalah metode perhitungan depresiasi aset tetap dimana setiap periode akuntansi diberikan beban yang sama secara merata. Beban depresiasi dihitung dengan cara mengurangi harga perolehan dengan nilai sisa dan dibagi dengan umur ekonomis aset tetap tersebut.

$$\text{Depresiasi} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Sisa}}{\text{Taksiran Umur Ekonomis Aset}}$$

Metode perhitungan depresiasi garis lurus akan menghasilkan beban depresiasi aset tetap yang sama dari tahun ke tahun. Metode ini juga dapat

menghasilkan beban depresiasi berupa suatu persentase dari harga perolehan aset tetap.

b. Metode Aktivitas (*Activity Method*)

Metode aktivitas (*activity method*) juga disebut pendekatan beban variabel atau pendekatan unit produksi, mengasumsikan depresiasi adalah fungsi dari penggunaan atau produktivitas dan bukan dari berlalunya waktu. Umur manfaat aset dinyatakan dengan jumlah *output* yang disediakan (unit-unit yang diproduksi) atau *input* seperti jumlah penggunaan jam kerja. Secara konsep, pengukuran biaya yang tepat bergantung pada output bukan pada jam penggunaan, tetapi nilai output tidak mudah diukur. Dalam hal ini, ukuran input seperti jam mesin adalah metode yang lebih tepat untuk mengukur nilai depresiasi aset pada periode akuntansi tertentu.

$$\text{Depresiasi} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Sisa} \times \text{total jam pemakaian satu periode}}{\text{Taksiran Jam Pemakaian Total}}$$

c. Metode Saldo Menurun Ganda (*Declining-Balance Method*)

Metode yang digunakan adalah dengan menggandakan tarif saldo garis lurus. Tidak seperti tarif lainnya yang menerapkan nilai residu, pada metode ini nilai residu tidak ikut dipertimbangkan dalam penghitungan beban depresiasi suatu aset. Walaupun nilai residu tidak ikut dipertimbangkan dalam penghitungan beban depresiasi, namun depresiasi aset tetap tidak boleh lebih rendah dari pada nilai residunya.

d. Metode Jumlah Angka Tahun (*Sum of the-Years-Digits Method*)

Metode ini menghasilkan beban depresiasi yang menurun berdasarkan pecahan yang menurun dari biaya yang disusutkan (biaya perolehan dikurangi nilai sisa). Setiap pecahan menggunakan jumlah angka tahun sebagai penyebut dan jumlah tahun estimasi umur yang tersisa pada awal tahun sebagai pembilang.

1.2.7 Revaluasi Aset Tetap

Revaluasi adalah penilaian kembali terhadap aset tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar. Tujuan penilaian kembali aset tetap perusahaan dimaksudkan agar perusahaan dapat melakukan perhitungan penghasilan dan biaya yang wajar sehingga mencerminkan kemampuan dan nilai perusahaan yang sebenarnya. Penilaian kembali aset tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aset tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali yang ditetapkan oleh perusahaan jasa atau ahli penilai yang diakui/ memperoleh izin pemerintah.

Manfaat Revaluasi:

1. Neraca menunjukkan posisi keuangan yang wajar.
2. Kenaikan nilai aset tetap, mempunyai konsekuensi naiknya beban depresiasi aset tetap yang dibebankan ke dalam laba rugi, atau dibebankan ke harga pokok produksi.

Menurut PSAK No.16 Paragraf 34 Tahun 2015, frekuensi revaluasi bergantung pada perubahan nilai wajar dari aset tetap yang direvaluasi. Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya, maka revaluasi lanjutan disyaratkan. Beberapa aset tetap mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan fluktuatif sehingga perlu direvaluasi secara tahunan. Revaluasi tahunan tersebut tidak perlu dilakukan untuk aset tetap yang perubahan nilai wajarnya tidak signifikan. Sebaliknya, aset tetap tersebut mungkin perlu direvaluasi setiap tiga atau lima tahun sekali.

Aset tetap dalam suatu kelas aset tetap direvaluasi secara bersamaan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan bercampurnya biaya perolehan dan nilai lain pada tanggal berbeda. Akan tetapi, suatu kelas aset dapat direvaluasi secara bergantian sepanjang revaluasi dari kelas aset tersebut dapat diselesaikan secara lengkap dalam periode yang singkat dan sepanjang revaluasi dimutakhirkan.

a. Pengakuan Revaluasi

Jika, jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Akan tetapi, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi. Sedangkan, jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Akan tetapi, penurunan nilai tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut. Penurunan nilai yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tersebut mengurangi jumlah akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi.

1.2.8 Penurunan Aset Tetap

Suatu aset mengalami penurunan nilai jika jumlah tercatatnya melebihi jumlah terpulihkan. Pada setiap akhir periode pelaporan, suatu entitas harus menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Dalam menentukan ada tidaknya indikasi penurunan nilai, perusahaan harus mempertimbangkan informasi internal dan informasi eksternal.

a) Informasi Internal

- 1) Bukti keusangan atau kerusakan fisik aset
- 2) Perubahan signifikan atas perubahan, penghentian, dan masa manfaat aset
- 3) Bukti internal mengindikasikan bahwa kinerja aset lebih buruk dari yang diharapkan

b) informasi Eksternal

- 1) Perubahan signifikan nilai pasar
- 2) Perubahan signifikan teknologi, pasar, ekonomi, dan lingkup hukum
- 3) Perubahan suku bunga
- 4) Jumlah tercatat aset neto entitas melebihi kapitalisasi pasarnya

Berdasarkan PSAK No. 16 paragraf 63 Tahun 2015, dalam menentukan apakah aset tetap mengalami penurunan nilai, entitas menerapkan PSAK 48: *Penurunan Nilai Aset*. PSAK 48 menjelaskan bagaimana entitas menelaah jumlah tercatat asetnya, bagaimana menentukan jumlah terpulihkan dari aset, dan kapan mengakui atau membalik rugi penurunan nilai.

a) Pengakuan Dan Pengukuran Rugi Penurunan Nilai

Jika nilai terpulihkan aset lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkan. Nilai terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan (*Fair value less costs to sell*) dan nilai pakai (*Value in use*). Jika nilai wajar dikurangi biaya penjualan atau nilai pakai lebih tinggi dari nilai tercatatnya, maka tidak ada penurunan. Sebaliknya, jika nilai wajar dikurangi biaya penjualan atau nilai pakai lebih rendah dari nilai tercatatnya, maka terjadi penurunan.

Rugi penurunan nilai segera diakui dalam laporan laba rugi yaitu pada pendapatan komprehensif lain dan menambah akumulasi depresiasi aset tersebut. Setelah pengakuan rugi penurunan nilai, beban depresiasi (amortisasi) aset disesuaikan di masa depan untuk mengalokasikan nilai tercatat aset revisian, setelah dikurangi nilai sisa (jika ada), secara sistematis selama sisa masa manfaatnya. Contoh jurnal :

Rugi penurunan nilai	xxx
Akumulasi depresiasi	xxx

b) Pembalikan suatu Rugi Penurunan Nilai –Aset Individu

Jumlah tercatat aset yang meningkat, yang disebabkan pembalikan rugi penurunan nilai, tidak boleh melebihi jumlah tercatat (neto setelah amortisasi atau depresiasi) seandainya aset tidak mengalami rugi penurunan nilai di tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset diakui segera pada pendapatan komprehensif lain dalam laporan laba rugi.

Contoh jurnal:

Akumulasi depresiasi	xxx	
Pembalikan penurunan nilai		xxx

1.2.9 Penghentian Atas Pelepasan Aset Tetap

Menurut PSAK No. 16 Paragraf 67 Tahun 2015, jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Perusahaan dapat menghentikan aset gedung atau menghapusnya dengan cara:

- 1) Penjualan,
- 2) Pertukaran,
- 3) Konversi paksaan, atau
- 4) Ditinggalkan

Pada saat terjadi penjualan atau pertukaran aset, depresiasi harus dilakukan pada tanggal disposisi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dimasukkan dalam laba rugi ketika aset tetap tersebut dihentikan pengakuannya. Keuntungan atau kerugian ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya. Menurut PSAK No. 68 Tahun 2015, keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dimasukkan dalam laba rugi ketika aset tetap tersebut dihentikan pengakuannya (kecuali PSAK 30: Sewa mensyaratkan perlakuan yang berbeda dalam transaksi jual dan sewa balik), keuntungan tidak boleh di klasifikasikan sebagai pendapatan.

1.2.10 Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

Berdasarkan PSAK No. 16 paragraf 73 Tahun 2015, Laporan keuangan mengungkapkan untuk setiap kelas aset tetap:

- a) dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto;
- b) metode depresiasi yang digunakan;
- c) umur manfaat atau tarif depresiasi yang digunakan;
- d) jumlah tercatat bruto dan akumulasi depresiasi (digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; dan
- e) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - i. Penambahan;
 - ii. Aset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan dan pelepasan lain;
 - iii. Perolehan melalui kombinasi bisnis;
 - iv. Peningkatan atau penurunan akibat dari revaluasi sesuai dengan paragraf 31, 39, dan 40 serta dari rugi penurunan nilai yang diakui atau dibalik dalam penghasilan komprehensif lain sesuai dengan PSAK 48: Penurunan Nilai Aset;
 - v. Rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi sesuai dengan PSAK 48;
 - vi. Pembalikan rugi penurunan nilai dalam laba rugi sesuai dengan PSAK 48;
 - vii. Depresiasi;
 - viii. Selisih kurs neto yang timbul dalam penjabaran laporan keuangan dari mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan yang berbeda, termasuk penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri menjadi mata uang pelaporan dari entitas pelapor; dan
 - ix. Perubahan lain.

1.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, yakni sebagai berikut:

1. Menerapkan kemampuan berupa ilmu (*hard skills*) dan praktek (*soft skills*) yang diperoleh selama masa kuliah.
2. Memperdalam ilmu serta memperkuat keterampilan yang dimiliki pada bidang akuntansi.
3. Memperoleh data, informasi, dan keterangan-keterangan pendukung yang dibutuhkan sehubungan dengan analisa dan rumusan masalah yang diangkat pada penulisan Tugas Akhir (TA).
4. Membandingkan teori yang selama ini di peroleh dalam perkuliahan dengan praktik yang terjadi sebenarnya di dunia kerja.
5. Memenuhi syarat kelulusan pada program studi Diploma III-Akuntansi Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga.

1.4 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan yang dilaksanakan, diharapkan mampu memberikan manfaat kepada banyak pihak, yakni sebagai berikut:

1.4.1 Bagi Mahasiswa

1. Melatih sikap profesional, tanggung jawab dan disiplin sebagai bekal untuk menghadapi dunia kerja di masa datang.
2. Mengetahui dan dapat belajar secara langsung bagaimana perlakuan akuntansi yang diterapkan dalam PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Juanda.
3. Menjadi tolak ukur kemampuan diri serta ilmu pengetahuan yang telah dimiliki. Dengan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan maka mahasiswa mampu mengukur sejauh mana kemampuan diri serta ilmu pengetahuan yang telah diperoleh.
4. Menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman sebagai generasi muda terdidik Indonesia yang nantinya akan berkontribusi langsung pada dunia kerja.

5. Memenuhi tugas mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai mata kuliah prasyarat kelulusan mahasiswa Diploma III-Akuntansi Universitas Airlangga.

1.4.2 Bagi PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Juanda

1. Memberikan peran dan kontribusi positif kepada mahasiswa, khususnya dalam membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai generasi muda penerus bangsa.
2. Memberikan kesempatan dan pengetahuan kepada para mahasiswa untuk mengetahui kinerja operasional perusahaan.
3. Diharapkan dapat meningkatkan hubungan kemitraan dan kerjasama dengan Universitas Airlangga, serta dapat melihat kemampuan potensial yang dimiliki mahasiswa selama PKL sehingga dapat dijadikan standart untuk perekrutan tenaga kerja.
4. Dapat memudahkan para staff dan karyawan PT. Angkasa Pura I (Persero) dalam menyelesaikan tugas pekerjaan sehari – harinya selama Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan.

1.4.3 Bagi Pembaca

1. Memberikan informasi dan menambah ilmu pengetahuan kepada pembaca serta menjadi sumber referensi bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya.
2. Memberikan gambaran tentang praktik kerja di perusahaan.
3. Menggambarkan perlakuan akuntansi yang diterapkan secara langsung oleh perusahaan.

1.5 Rencana Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Juanda. Perusahaan ini beralamat di Jalan Ir. Haji Juanda Surabaya 61253, Jawa Timur. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dimulai pada tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan 29 Februari 2016. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada *Financial & IT Department Head*, khususnya pada bagian *accounting section*. Adapun jadwal kegiatan Praktik Kerja Lapangan, penyusunan laporan, hingga rencana presentasi hasil kegiatan berupa laporan Tugas Akhir (TA) dapat dilihat pada Tabel 1.2

Tabel 1.2

Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Lapangan

No.	Kegiatan	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penentuan tempat PKL	■																							
2	Permohonansurat PKL	■																							
3	Pengajuan dan persetujuan proposal PKL		■																						
4	Pelaksanaan PKL			■	■	■	■	■	■																
5	Penentuan topik dan dosen pembimbing									■	■	■	■												
6	penyusunan laporan PKL										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
7	Konsultasi dengan dosen pembimbing										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
8	Presentasi laporan PKL																							■	

BAB 2

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

2.1 Gambaran Umum Perusahaan

2.1.1 Sejarah

PT Angkasa Pura I (Persero) yang selanjutnya disebut Angkasa Pura Airports bertekad mewujudkan perusahaan berkelas dunia yang profesional. Sejarah Angkasa Pura Airports sebagai pelopor pengusaha kebandarudaraan secara komersial di Indonesia bermula dari kunjungan kenegaraan Presiden Soekarno ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan Presiden John F Kennedy. Setibanya di tanah air, Presiden Soekarno menegaskan keinginannya kepada Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum agar lapangan terbang di Indonesia dapat setara dengan lapangan terbang di negara maju.

Pada tanggal 15 November 1962 terbitlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara (PN) Angkasa Pura Kemayoran. Tugas pokoknya adalah untuk mengelola dan mengusahakan Pelabuhan Udara Kemayoran di Jakarta yang saat itu merupakan satu-satunya bandar udara internasional yang melayani penerbangan dari dan ke luar negeri selain penerbangan domestik. Setelah melalui masa transisi selama dua tahun, terhitung sejak 20 Februari 1964 PN Angkasa Pura Kemayoran resmi mengambil alih secara penuh aset dan operasional Pelabuhan Udara Kemayoran Jakarta dari Pemerintah. Tanggal 20 Februari 1964 itulah yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Angkasa Pura Airports.

Pada tanggal 17 Mei 1965, berdasarkan PP Nomor 21 tahun 1965 tentang Perubahan dan Tambahan PP Nomor 33 Tahun 1962, PN Angkasa Pura Kemayoran berubah nama menjadi PN Angkasa Pura, dengan maksud untuk lebih membuka kemungkinan mengelola bandar udara lain di wilayah Indonesia. Secara bertahap, Pelabuhan Udara Ngurah Rai - Bali, Halim Perdanakusumah - Jakarta, Polonia -

Medan, Juanda - Surabaya, Sepinggan - Balikpapan, dan Sultan Hasanuddin - Ujungpandang, kemudian bergabung dalam pengelolaan PN Angkasa Pura. Selanjutnya, berdasarkan PP Nomor 37 tahun 1974, status badan hukum perusahaan diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum).

Dalam rangka pembagian wilayah pengelolaan bandar udara, berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 1987 tanggal 19 Mei 1987, nama Perum Angkasa Pura diubah menjadi Perusahaan Umum Angkasa Pura I, hal ini sejalan dengan dibentuknya Perum Angkasa Pura II yang secara khusus diberi tugas untuk mengelola Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma. Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 1992, bentuk Perum diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) yang sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh Negara Republik Indonesia sehingga namanya menjadi PT Angkasa Pura I (Persero) dengan Akta Notaris Muhani Salim, SH tanggal 3 Januari 1993 dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman dengan keputusan Nomor C2-470.HT.01.01 Tahun 1993 tanggal 24 April 1993 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 52 tanggal 29 Juni 1993 dengan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2914/1993.

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan terakhir adalah berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 14 Januari 1998 dan telah diaktakan oleh Notaris Imas Fatimah, SH Nomor 30 tanggal 18 September 1998. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-25829.HT.01.04 Tahun 1998 tanggal 19 November 1998 dan dicantumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 50 tanggal 22 Juni 1999 dengan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3740/1999. Hingga saat ini, Angkasa Pura Airports mengelola 13 (tiga belas) bandara di kawasan tengah dan timur Indonesia.

Pengelolaan Bandara Juanda oleh PT Angkasa Pura I (Persero) mengalami berbagai perkembangan, antara lain:

- a. Pada tanggal 1 Januari 1985, Bandara Juanda masuk jajaran PT Angkasa Pura I (Persero).

- b. Pada tanggal 26 Juli 1985, berdasarkan SKB 3 Menteri, Memperindag, Menhub dan Menkeu Nomor 855, 139 dan 677 Bandara Juanda sebagai bandara ekspor impor.
- c. Pada tanggal 12 Desember, 1987 Bandara Juanda melayani penerbangan Internasional dengan transit Bandara Soekarno Hatta (Singapura, Hongkong, Taipei dan Manila).
- d. Pada tanggal 1 Oktober 1988, Bandara Juanda melayani kedatangan Internasional dan sesuai dengan Kepres Nomor 46 tahun 1988, Bandara Juanda dinyatakan sebagai pintu masuk bebas visa bagi wisatawan.
- e. Pada tanggal 26 Mei 1990, VVIP diresmikan oleh Wakil Presiden Sudharmono, SH.
- f. Pada tanggal 24 Desember 1990, peresmian terminal internasional oleh Menhub Ir. Azwar Anas sekaligus pembukaan penerbangan internasional perdana.
- g. Pada tahun 1991, perusahaan penerbangan asing *Singapore Airlines* dan *China Southern Air* buka jalur ke Singapura dan Canton (China).
- h. Pada tanggal 15 Nopember 2006, peresmian gedung terminal baru dan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

2.1.2 Visi Perusahaan

Menjadi salah satu dari sepuluh perusahaan pengelola bandar udara terbaik di Asia.

2.1.3 Misi Perusahaan

1. Meningkatkan nilai pemangku kepentingan.
2. Menjadi mitra pemerintah dan pendorong pertumbuhan ekonomi.
3. Mengusahakan jasa kebandarudaraan melalui pelayanan prima yang memenuhi standar keamanan, keselamatan, dan kenyamanan.
4. Meningkatkan daya saing perusahaan melalui kreatifitas dan inovasi.
5. Memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan hidup.

2.1.4 Logo Perusahaan

Dua tangan berjabat memberi makna bahwa Angkasa Pura siap untuk melayani dan juga melambangkan *give and take* atau memberi dan menerima serta *togetherstronger* yaitu bersatu semakin teguh. Warna hijau melambangkan bisnis yang membumi dipadu warna biru yang melambangkan angkasa. Dua warna itu diharapkan menjadi warna harmonis. Serta dilengkapi dengan tulisan airports untuk memperjelas bisnis yang digeluti.

Gambar 2.1 Logo perusahaan



Sumber: data internal PT. Angkasa Pura 1 (Persero) Cabang Bandar Udara Juanda

2.1.5 Nilai Budaya Perusahaan

1. Sinergi
2. Adaptif
3. Terpercaya
4. Unggul

2.1.6 Bidang Usaha

Bidang usaha PT. Angkasa Pura 1 (Persero) Cabang Bandar Udara Juanda adalah jasa kebandarudaraan (*airport services*) yang terbagi atas dua bagian besar jenis pelayanan yang disediakan yaitu jasa aeronautika dan jasa non-aeronautika.

a) **Jasa Aeronautika**

Jasa aeronautika, adalah jasa layanan yang diberikan kepada perusahaan penerbangan dan penumpang yang terdiri dari:

1. ***Aircraft Parking***, jasa penempatan dan penyimpanan pesawat dalam bandar udara.
2. ***Passenger Processing***, jasa layanan penumpang dalam bandar udara berupa fasilitas-fasilitas guna kenyamanan penumpang.

b) **Jasa Non-Aeronautika**

Jasa non-aeronautika, adalah jasa layanan pendukung kebutuhan perusahaan penerbangan dan penumpang yang bekerjasama dengan berbagai pihak yang terdiri dari:

1. ***Food and Beverages***, layanan makanan dan minuman didalam maupun diluar terminal bandar udara.
2. ***Retail***, layanan perbelanjaan untuk kebutuhan penumpang di dalam bandara dimana di dalamnya termasuk *dutyfree*.
3. ***Advertising***, sebagai fasilitas umum yang strategis, bandar udara menyediakan ruang untuk iklan yang dapat digunakan oleh berbagai perusahaan.
4. ***Hotel***, bekerjasama dengan Angkasa Pura Hotel, bandar udara menyiapkan hotel transit di dalam terminal penumpang.
5. ***Property***, bandar udara menyewakan ruang (*space*) didalam maupun diluar terminal penumpang yang dapat disewa untuk berbagai kebutuhan.
6. ***Parkir Kendaraan***, layanan parkir kendaraan penumpang maupun penjemput termasuk di dalamnya layanan *airport shuttle, taxi, bus*, dan lainnya.

7. *Cargo Service*, layanan pengelolaan kargo pesawat termasuk di dalamnya pemeriksaan dan penyimpanan kargo.

2.1.7 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan dan wewenang antara satu bagian dengan bagian yang lain, serta bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi antar bagian dibatasi. Setiap organisasi pasti memiliki struktur organisasi, dan struktur organisasi PT. Angkasa Pura 1 (Persero) Cabang Bandar Udara Juanda disajikan pada Gambar 2.2

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Perusahaan



Sumber: data internal PT Angkasa Pura 1 (Persero) Cabang Bandar Udara Juanda

Berdasarkan Gambar 2.2 maka tugas pokok dan tanggung jawab direksi hingga seluruh *Department Head* adalah sebagai berikut:

1. ***General Manager (GM)***, mempunyai tugas pokok:
 - a. Menetapkan kebijakan, tujuan, serta mengambil keputusan terkait kegiatan operasional perusahaan.
 - b. Mengkoordinir tugas *Shared Serviced Department, Finance and Information Department, Sales Department, SMS, QM, and CS Department, Airport Security Department, Airport Readiness Department, dan Airport Operation Department*.
 - c. Berkoordinasi dengan Dewan Direksi pusat.

2. ***Shared Services Department***, mempunyai tugas pokok:
 - a. Melaksanakan kebijakan perusahaan dibidang sumber daya manusia (SDM) dan umum.
 - b. Menjamin kualitas sumber daya manusia (SDM) dan memfasilitasi seluruh pegawai perusahaan pada bidang umum.

3. ***Finance and Information Department***, mempunyai tugas pokok:
 - a. Melaksanakan kebijakan perusahaan dibidang keuangan dan pelaksanaan teknologi informasi (IT) di dalam perusahaan.
 - b. Melaksanakan kegiatan akuntansi dan *treasury* perusahaan.
 - c. Menjamin dan menyediakan kegiatan informasi (IT) di dalam dan di luar perusahaan melalui web resmi perusahaan.

4. ***Sales Department***, mempunyai tugas pokok:
 - a. Melaksanakan kebijakan perusahaan di bidang kegiatan usaha dalam bisnis kebandarudaraan perusahaan.

- b. Mengkoordinir seluruh mitra kerja perusahaan agar mematuhi kebijakan yang diterapkan perusahaan.

5. ***SMS, QM, and CS Department***, mempunyai tugas pokok:

- a. Melaksanakan kebijakan perusahaan di bidang keselamatan kerja, kualitas manajemen, dan pelayanan *customer*.
- b. Menjamin keselamatan dan kesehatan di lingkungan perusahaan, peningkatan kualitas manajemen, dan kepuasan terhadap *customer*.

6. ***Airport Security Department***, mempunyai tugas pokok:

- a. Melaksanakan kebijakan perusahaan di bidang keamanan bandara.
- b. Menegakkan peraturan yang berlaku serta menjamin keamanan di lingkungan perusahaan, area publik bandara, hingga *screening check point* maskapai dan penumpang.

7. ***Airport Readiness Department***, mempunyai tugas pokok:

- a. Melaksanakan kebijakan perusahaan di bidang kesiapan fasilitas dan perlengkapan bandara.
- b. Menjamin kesiapan dan ketersediaan perlengkapan dan fasilitas di area bandara guna kenyamanan dan kepuasan seluruh penumpang, *customer*, dan mitra kerja perusahaan.

8. ***Airport Operation Department***, mempunyai tugas pokok:

- a. Melaksanakan kebijakan perusahaan di bidang pelayanan *service* bandara dan penyelamatan darurat.
- b. Melaksanakan kegiatan pelayanan *service* bandara dan menjamin kesiapan penyelamatan darurat di area bandara.

2.1.8 Lima Arah Strategis

PT. Angkasa Pura 1 (Persero) dalam merealisasikan visi perusahaan dengan menjadi salah satu dari sepuluh perusahaan pengelola bandar udara terbaik di Asia, memiliki lima arah strategis yang diterapkan dalam kegiatan usahanya guna mencapai tujuan, yakni:

Gambar 2.3 Lima arah strategis perusahaan



Sumber: data internal PT. Angkasa Pura 1 (Persero) Cabang Bandar Udara Juanda

1. *Services Excellence*

- a. Peningkatan CSI.
- b. Peremajaan alat-alat produksi.
- c. Pelaksanaan pembangunan bandara baru.
- d. Pemenuhan jumlah SDM dan fasilitas produksi.

2. *Revenue Enhancement*

- a. Optimalisasi sistem kerjasama dengan mitra atau konsesionaler.
- b. Peningkatan pendapatan aeronautika dan non-aeronautika.
- c. Pembentukan anak perusahaan.

3. *Reasonable Cost*

- a. Efektifitas penggunaan anggaran.
- b. Keseimbangan peningkatan pendapatan dengan peningkatan biaya.

4. *Environment*

- a. Penyaluran program kemitraan.
- b. Pemberian dana Program Bina Lingkungan.
- c. Penerapan *Eco Green Airport*.
- d. Dampak sosial dan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja lokal.

5. *Sound Organization*

- a. Resturkturisasi organisasi.
- b. *Wokrshop* budaya baru perusahaan.
- c. Pencanangan *Center for Excelent*.
- d. *Management training* melalui *strategic patnership*.
- e. Penetapan *master plan* IT.
- f. Reaktivasi *training* untuk berbagai level.

2.1.9 Anak Perusahaan

PT. Angkasa Pura 1 (Persero) memiliki lima anak perusahaan yang kegiatan operasionalnya bekerjasama menjadi satu, yakni meliputi:

1. Angkasa Pura *Hotels*, anak perusahaan yang menjalankan bisnis *hospitality service, hotels*, dan *lounges* khusus di dalam area bandara.

2. Angkasa Pura *Property*, anak perusahaan yang menjalankan bisnis pengembang properti terpercaya dan berorientasi terhadap lingkungan.
3. Angkasa Pura *Supports*, anak perusahaan yang bergerak dibidang penyediaan barang dan jasa secara umum dan secara khusus kepada perusahaan induk guna meningkatkan *quality services* bandara modern.
4. Angkasa Pura *Logistics*, anak perusahaan yang bergerak dibidang logistik yang melayani kegiatan usaha di seluruh wilayah Indonesia.
5. Angkasa Pura *Retail*, anak perusahaan yang bergerak dibidang *travel retail industry* yang pelayanannya berada di area bandara.

2.2 Perlakuan Akuntansi Aset Tetap PT Angkasa Pura I (Persero)

PT. Angkasa Pura 1 (Persero) sebagai perusahaan BUMN yang membawahi 13 cabang bandar udara di Indonesia memiliki panduan pelaksanaan akuntansi yang dibuat berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Buku panduan tersebut menjadi dasar perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Juanda.

2.2.1 Pengertian dan Penggolongan Akuntansi

Menurut Panduan Pelaksanaan Akuntansi PT. Angkasa Pura I (Persero), PSAK *Edition* halaman 80, aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh untuk digunakan dalam operasi perusahaan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap perusahaan dikelompokkan berdasarkan jenisnya, meliputi:

- 1) Tanah;
- 2) Bangunan lapangan;
- 3) Gedung-gedung;
- 4) Alat perhubungan udara;
- 5) Peralatan groundhandling;

- 6) Peralatan lain;
- 7) Lain-lain aset tetap.

2.2.2 Pengakuan Awal Aset Tetap

Panduan Pelaksanaan Akuntansi PT. Angkasa Pura I (Persero), PSAK *Edition* halaman 81 menyatakan bahwa suatu benda berwujud harus diakui sebagai aset tetap bila biaya perolehan aset dapat diukur secara handal dan besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomis di masa datang yang berkaitan dengan aset tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan. Batasan kapitalisasi aset tetap dapat diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan kriteria pengakuan aset tetap. Guna ketepatan pengakuan dan pengendalian kebijakan nilai batasan kapitalisasi akan ditinjau secara berkala dan ditetapkan dengan keputusan direksi. Batasan kapitalisasi adalah apabila biaya per unitnya minimal sama dengan atau di atas Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan untuk mengakui aset tetap yaitu barang berwujud yang memiliki batas minimum pengadaan Rp 10.000.000 dan masa manfaat lebih dari satu tahun. Sedangkan untuk barang berwujud yang memiliki nilai di bawah Rp 10.000.000 dan memiliki masa manfaat lebih dari satu periode, maka barang tersebut diakui sebagai LVA (*Low Value Aset*) dan biaya perolehan aset tersebut dibebankan pada periode terjadinya transaksi pembelian. Jurnal yang dibuat adalah dengan mendebit beban LVA dan mengkredit akun GRIR (*Goods Receive Invoice Receive*). Akun GRIR merupakan akun perantara yang digunakan perusahaan khususnya digunakan oleh bagian *General Affair* dan bagian *Accounting*. Pada bagian *accounting*, akun GRIR digunakan sebagai perantara akun utang. Sedangkan pada bagian kasir, akun ini sebagai perantara akun kas/bank.

Sebagai contoh pada tanggal 1 januari 2016 PT Angkasa Pura I melakukan pembelian sofa yang akan diletakkan di *lobby* kantor. Sofa tersebut seharga Rp 8.500.000,- Pada saat itu jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

1 Jan 2016	Beban LVA	8.500.000
	GRIR	8.500.000

Contoh lain untuk pembelian aset yaitu pada tanggal 2 februari 2016 perusahaan membeli laptop yang akan digunakan oleh manajer keuangan dalam mendukung pekerjaannya. laptop tersebut seharga Rp 12.000.000 ditambah biaya pemasangan sistem sebesar Rp 1.000.000 maka perusahaan akan mencatat jurnal sebagai berikut:

2 Feb 2016	Laptop	13.000.000
	GRIR	13.000.000

2.2.3 Perolehan Aset Tetap

Panduan Pelaksanaan Akuntansi PT. Angkasa Pura 1 (Persero), PSAK *Edition* halaman 81 menyatakan bahwa aset tetap dapat diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun dahulu sampai siap pakai. Berdasarkan sumber dana perolehan, aset tetap dapat diperoleh dari:

1. Pengadaan sendiri (bangun sendiri dan pembelian)

Aset tetap yang berasal dari pengadaan sendiri dicatat berdasarkan biaya perolehan dan pencatatan berdasarkan tanggal serah terima fisik 100% yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Harga perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya, termasuk biaya impor dan Pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon dan setiap biaya yang dapat dikaitkan langsung sehingga aset tersebut siap digunakan, serta dikurangi potongan pembelian (jika ada). Contoh biaya yang dapat dikaitkan dan biaya yang bukan merupakan biaya perolehan aset tetap disajikan dalam lampiran. Sebagian besar aset tetap PT Angkasa Pura 1 (Persero) diperoleh melalui pembangunan sendiri.

Contoh ilustrasi, perusahaan melakukan pembangunan pelataran gedung serba guna dan musholla yang terletak di sebelah kantor PT. Angkasa Pura 1 (Persero). Pembangunan ini telah dianggarkan oleh perusahaan sejak tahun 2014. Karena membutuhkan jasa vendor dalam proses pelaksanaan pembangunan, maka perusahaan melakukan pengadaan tender. Setelah terpilih salah satu vendor, dibuat kontrak yang menyangkut cara pembayaran, jangka waktu pelaksanaan, biaya pembangunan, dll. Cara pembayaran yang akan dilakukan yaitu pembayaran secara termin. Pembayaran dilakukan ketika prestasi fisik pembangunan mencapai 25%, 50%, 75% dan 100%. Biaya yang akan dikeluarkan untuk pembangunan ini yaitu meliputi:

Gedung serba guna dan pelatarannya	Rp 1.647.534.773
Musholla	Rp 382.676.794
Instalasi musholla	Rp 13.613.150
Instalasi gedung serba guna	Rp 17.360.283
Total biaya pembangunan	Rp 2.061.185.000

Pada tanggal 1 Januari 2015 pembangunan mulai dikerjakan. Sesuai kontrak, ketika pembangunan telah mencapai 25% yaitu pada tanggal 7 Maret 2015 vendor mengirimkan surat tagihan kepada perusahaan senilai Rp 515.296.250 dan perusahaan langsung melakukan pembayaran melalui transfer. Jurnal yang dicatat oleh perusahaan saat itu adalah

7 Maret 2015	Aset dalam penyelesaian	515.296.250
	GRIR	515.296.250

Pada tanggal 10 juni 2015 prestasi fisik pembangunan telah selesai 50%. Tanggal 8 september 2015, prestasi fisik mencapai 75% sehingga jurnal yang akan dibuat oleh perusahaan adalah

10 Juni 2015	Aset dalam penyelesaian	515.296.250
	GRIR	515.296.250
8 Sept 2015	Aset dalam penyelesaian	515.296.250
	GRIR	515.296.250

Pada tanggal 20 desember 2015, pembangunan telah selesai 100% dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST). Saat perusahaan menerima BAST, bangunan diakui sebagai aset tetap. Sehingga jurnal yang akan dicatat perusahaan adalah

20 Des 2015	Aset dalam penyelesaian	515.296.250
	GRIR	515.296.250
20 Des 2015	Pelataran GSG dan musholla	1.647.534.773
	Pelataran GSG dan musholla	382.676.794
	Pelataran GSG dan musholla	13.613.150
	Pelataran GSG dan musholla	17.360.283
	Aset dalam penyelesaian	2.061.185.000

Ayat jurnal untuk ilustrasi diatas didukung dengan data yang disajikan dalam lampiran.

2. Pemerintah (diperoleh atau hibah dari pemerintah)

Berdasarkan buku Panduan Pelaksanaan Akuntansi PT. Angkasa Pura I (Persero), PSAK *Edition* halaman 83 menyatakan bahwa aset tetap yang diperoleh dari pemerintah dapat berupa Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS) dan hibah pemerintah. Hibah pemerintah, termasuk hibah non-moneter pada nilai wajar, tidak boleh diakui sampai terdapat keyakinan yang memadai bahwa perusahaan akan mematuhi kondisi yang

melekat pada hibah tersebut dan hibah akan diterima. Pendekatan akuntansi yang diterapkan adalah pendekatan penghasilan. Aset tetap dicatat berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO).

3. Tukar menukar

Aset tetap yang berasal dari tukar-menukar dan bersifat substansi komersial dicatat berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan, jika tidak maka dicatat sebesar nilai wajar aset tetap yang diterima. Yang dimaksud dengan substansi komersial adalah signifikan antara nilai wajar aset yang diserahkan dikurangi nilai wajar aset yang diterima. Biaya dari pos semacam itu diukur pada nilai wajar aset yang dilepas atau diperoleh, mana yang lebih andal, setelah disesuaikan dengan jumlah dana yang diterima/diserahkan.

4. Sewa pembiayaan (*financial lease*)

Aset tetap dapat diperoleh dari transaksi sewa pembiayaan. Sedangkan jika dilakukan dengan sewa operasi tidak dicatat sebagai aset tetap. Klasifikasi sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada formalitas kontraknya. Aset sewaan dan liabilitas diakui sebesar nilai wajar atau nilai kini dari pembayaran sewa minimum (jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar). Kebijakan depresiasi untuk aset sewaan harus konsisten dengan aset yang dari pengadaan sendiri. Berdasarkan wawancara, perusahaan belum pernah memperoleh aset tetap melalui sewa pembiayaan, hanya melalui sewa operasi.

Contoh ilustrasi, perusahaan membutuhkan komputer untuk mendukung operasional kantor. Pengadaan komputer dilakukan dengan cara sewa operasi dari vendor. Pada tanggal 1 Juli 2015, perusahaan melakukan kontrak sewa dengan vendor Abdi Jaya. Perjanjian untuk pembayaran sewa tidak dilakukan dimuka, melainkan pada setiap akhir bulan. Harga sewa untuk seluruh komputer

yang digunakan perusahaan seharga Rp 7.500.000 setiap bulan. Pada tanggal 31 Juli, bagian akuntansi akan mencatat jurnal sebagai berikut :

31 Juli 2015	Beban sewa	7.500.000
	Utang usaha	7.500.000

5. Kerjasama usaha (KSU)

Kerjasama usaha (KSU) adalah investasi dalam bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama-sama menanggung resiko usaha tersebut sesuai perjanjian.

2.2.4 Pengukuran Setelah Pengakuan

PT. Angkasa Pura 1 (Persero) memilih model biaya sebagai kebijakan akuntansi dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelas yang sama. Setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Pada saat adanya pengeluaran untuk aset tetap berupa biaya pemeliharaan, biaya perbaikan atas kerusakan kecil pada aset seperti perbaikan pada lubang-lubang landasan pesawat terbang, maka biaya-biaya tersebut diakui sebagai beban pemeliharaan pada periode bersangkutan. Pembebanan biaya tersebut juga diterapkan untuk pengeluaran reorganisasi dan penataan ulang aset tetap. Sedangkan pengeluaran yang digunakan untuk memperbesar atau memperluas fasilitas aset seperti melakukan perluasan pada landasan pesawat terbang, biaya ini akan dikapitalisasi sehingga menambah harga perolehan aset tetap.

Contoh ilustrasi, pada tanggal 3 maret 2015 PT. Angkasa Pura 1 (Persero) Cabang Bandar Udara Juanda melakukan penataan ulang pada salah satu ruang gedung kantor AOB. Ruang yang sebelumnya digunakan sebagai ruang TU (Tata Usaha) dialihfungsikan sebagai ruang EOC (*Emergency Operation Center*). Oleh karena itu, perlu penataan ulang dan perbaikan kecil seperti pemasangan sekat-sekat

pembatas pada ruangan untuk menyesuaikan kebutuhan bagian EOC. Total biaya renovasi ruangan yaitu senilai Rp 9.500.000. Biaya tersebut oleh perusahaan diakui sebagai beban pemeliharaan dalam laporan laba rugi periode bersangkutan. Jurnal yang dibuat adalah :

3 Maret 2015	Beban pemeliharaan	9.500.000	
	Utang usaha		9.500.000

2.2.5 Depresiasi Aset Tetap

Depresiasi aset tetap perusahaan, disusutkan secara sistematis selama masa manfaatnya. Jumlah yang dapat disusutkan adalah biaya perolehan suatu aset, atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya perolehan dalam laporan keuangan, dikurangi nilai sisanya. Seluruh aset tetap kecuali tanah, disusutkan berdasarkan metode garis lurus. Metode garis lurus menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Umur manfaat untuk setiap jenis aset tetap, disajikan dalam lampiran.

Perhitungan depresiasi dilakukan ketika aset tetap mulai digunakan. Apabila penggunaan aset terjadi antara tanggal 1-15, maka depresiasi dihitung pada bulan tersebut. Namun apabila terjadi antara tanggal 16-31, depresiasi dihitung pada bulan berikutnya. Depresiasi untuk setiap periode diakui sebagai beban dalam laporan laba/rugi pada periode yang bersangkutan.

Apabila manfaat ekonomis suatu aset tetap tidak lagi sebesar jumlah tercatatnya, maka aset tersebut harus dinyatakan sebesar jumlah yang sepadan dengan nilai manfaat ekonomis yang tersisa. Nilai residu dan umur manfaat dari suatu aset dikaji sekurang-kurangnya setiap akhir tahun buku dan jika hasil kajian berbeda dengan estimasi sebelumnya maka perbedaan tersebut diperlakukan sebagian perubahan estimasi akuntansi berlaku secara prospektif.

Contoh ilustrasi, perusahaan melakukan pembangunan gedung yang selesai dan siap digunakan pada tanggal 20 Desember 2015. Harga perolehan gedung

tersebut senilai Rp 2.061.185.000 berdasarkan kebijakan dalam buku pedoman perusahaan, gedung perkantoran memiliki umur manfaat 40 tahun. Depresiasi dihitung mulai bulan januari 2016 karena pengakuan aset tertanggal 20 desember 2015 yang berarti lebih dari tanggal 15. Sehingga perhitungan depresiasi dilakukan pada akhir bulan januari 2016 dengan metode garis lurus. Perhitungan beban depresiasi sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kelompok Aset Tetap Berdasarkan Umur Ekonomis

KELOMPOK ASET	UMUR EKONOMIS
Gedung-gedung	40 tahun
Terminal	40 tahun
Hangar	40 tahun
Gudang	40 tahun
Kantor	40 tahun
Pertokoan	40 tahun
Perumahan	40 tahun

Sumber: data internal PT. Angkasa Pura 1 (Persero) Cabang Bandar Udara Juanda

Depresiasi pertahun:

$$2.061.185.000/40 \text{ tahun} = 51.529.625$$

Depresiasi per bulan:

$$51.529.625/12 \text{ bulan} = 4.294.135$$

Maka perusahaan akan mencatat jurnal:

31 Januari 2016	Beban depresiasi	4.294.135
	Akumulasi depresiasi	4.294.135

2.2.6 Revaluasi Aset Tetap

Penerapan revaluasi aset tetap pada PT. Angkasa Pura 1 (Persero) cabang Juanda dilakukan berdasarkan keputusan atau perintah dari kantor pusat. Sedangkan keputusan kantor pusat dipengaruhi oleh adanya perubahan nilai wajar yang signifikan pada aset tetap dan kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah. Revaluasi terakhir yang dilakukan oleh perusahaan adalah pada tahun 1993. Tahun ini akan melakukan revaluasi kembali untuk aset tetap, khususnya gedung.

2.2.7 Penurunan Nilai Aset Tetap

Berdasarkan buku Panduan Pelaksanaan Akuntansi PT. Angkasa Pura I (Persero), PSAK *Edition* halaman 90, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, perusahaan harus menilai kembali ada tidaknya indikasi penurunan nilai aset. Jika terdapat indikasi penurunan nilai aset, perusahaan harus menaksir jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut. Dalam mengidentifikasi terdapat atau tidaknya penurunan nilai aset tetap, paling tidak perusahaan harus mempertimbangkan hal-hal informasi dari luar dan dari dalam perusahaan. Penurunan nilai kegunaan aset tetap diakui sebagai kerugian. Namun hingga saat ini, penurunan nilai aset tetap belum pernah terjadi pada perusahaan.

2.2.8 Penghentian Aset Tetap

Aset tetap dihentikan pengakuannya dari kelompok aset tetap apabila dijual, dihibahkan, dan ditarik secara permanen dari penggunaannya serta memperoleh persetujuan penghentian dari kantor pusat. Prosedur yang dilakukan oleh perusahaan yaitu apabila aset tetap dinilai tidak lagi memiliki masa manfaat, maka PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Juanda membuat usulan penghentian aset tetap kepada kantor pusat. Jika usulan tersebut disetujui, maka aset dihapus dari daftar aset tetap. Aset tetap yang masih memiliki nilai jual, maka diadakan pelelangan untuk aset tetap

tersebut. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan aset tetap diakui sebagai pendapatan nonusaha atau beban nonusaha.

Contoh ilustrasi, pada tanggal 12 April 2015 mesin pemotong RW sweeper dengan harga perolehan Rp 17.000.000 memiliki masa manfaat 10 tahun telah habis masa manfaatnya. Perusahaan melakukan cek fisik dan menilai mesin tersebut. Ternyata mesin sudah rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Perusahaan melakukan pengajuan kepada kantor pusat untuk penghapusan aset tetap. Pada tanggal 1 Mei 2015 perusahaan mendapat konfirmasi persetujuan dari kantor pusat untuk melakukan penghapusan aset tetap, sehingga perusahaan akan mencatat jurnal sebagai berikut:

1 Mei 2015	Akumulasi depresiasi	17.000.000
	Aset tetap	17.000.000

2.2.9 Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

a Penyajian

1. Aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi depresiasi dan kerugian penurunan nilai.
2. Tanah disajikan sebagai bagian kelompok aset tetap sebesar biaya perolehan.

b Pengungkapan

Model pengukuran yang digunakan untuk aset tetap yaitu model biaya.

1. Rincian jenis dan jumlah aset tetap;
2. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah bruto aset tetap;
3. Metode depresiasi yang digunakan;
4. Masa manfaat atau tarif depresiasi yang digunakan;
5. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi depresiasi awal dan akhir periode;
6. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode;

7. Perubahan metode depresiasi harus diperlakukan sebagai suatu perubahan kebijakan akuntansi dan alasan perubahan.

2.3 Pembahasan

2.3.1 Pengakuan Awal Aset Tetap

PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Juanda Surabaya mengakui aset tetap terhadap aset yang memiliki batas minimum pengadaan Rp 10.000.000 dan masa manfaat lebih dari satu periode. Sedangkan untuk barang atau peralatan yang memiliki nilai di bawah Rp 10.000.000 dan masa manfaat lebih dari satu periode, peralatan tersebut diakui sebagai beban LVA (*Low Value Asset*) pada periode terjadinya transaksi pembelian.

Pengakuan awal aset tetap perusahaan telah sesuai dengan pernyataan PSAK No. 16 paragraf 07 tahun 2015 yang menyatakan bahwa aset tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal.

Aset tetap pada PT. Angkasa Pura 1 (Persero) dikelompokkan berdasarkan jenisnya, hal ini telah sesuai dengan PSAK No. 16 paragraf 37 tahun 2015 yang menyatakan bahwa suatu kelas aset tetap adalah pengelompokkan aset-aset yang memiliki sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi entitas.

2.3.2 Perolehan Aset Tetap

Perolehan aset tetap pada PT. Angkasa Pura 1 (Persero) Cabang Juanda berbentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu sampai siap pakai. Aset tetap dapat diperoleh melalui pengadaan sendiri, donasi atau hibah dari pemerintah, tukar menukar, sewa pembiayaan dan kerjasama usaha. Namun yang paling sering terjadi adalah perusahaan memperoleh aset tetap dengan cara pengadaan sendiri baik

pembelian tunai maupun membangun sendiri. Selama ini perusahaan belum pernah memperoleh aset tetap melalui sewa pembiayaan dan kerjasama usaha.

Cara perolehan dengan pembelian tunai atau membangun sendiri dicatat berdasarkan biaya perolehan dan diakui berdasarkan tanggal serah terima fisik 100% yang dituangkan dalam berita acara serah terima. Hal ini telah sesuai dengan PSAK No. 16 paragraf 22 tahun 2015 yang menyatakan bahwa biaya perolehan aset tetap adalah setara harga tunai pada tanggal pengakuan. Begitu juga dengan pengukuran biaya perolehan yang dapat dan tidak dapat dikaitkan langsung sehubungan dengan pembangunan sendiri, telah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 16 paragraf 16-20 tahun 2015.

Aset tetap yang diperoleh dari pemerintah dapat berupa BPYBDS (Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya) dan hibah pemerintah. Aset tetap dicatat berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO). Pendekatan akuntansi yang diterapkan adalah pendekatan penghasilan. Hal ini menunjukkan kesesuaian dengan pernyataan PSAK No. 16 paragraf 28 tahun 2015.

Aset tetap yang berasal dari tukar-menukar dan bersifat substansi komersial dicatat berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan, jika tidak maka dicatat sebesar nilai wajar aset tetap yang diterima. Perlakuan ini telah sesuai dengan pernyataan PSAK No. 16 paragraf 24 Tahun 2015.

2.3.3 Pengukuran Setelah Pengakuan

PT Angkasa Pura 1 (Persero) menerapkan model biaya sebagai kebijakan akuntansi untuk seluruh aset tetap. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 16 paragraf 30 tahun 2015 yang menjelaskan tentang model biaya.

Pengeluaran setelah pengakuan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau kemungkinan besar memberikan manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas dan mutu produksi oleh perusahaan

diakui sebagai tambahan nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan. Sedangkan pengeluaran yang dilakukan untuk perawatan, penataan ulang dan pemeliharaan aset tetap seperti contoh ilustrasi pada sub bagian 2.2.3 Pengukuran Setelah Pengakuan, diakui sebagai beban pemeliharaan dalam laporan laba rugi. Perlakuan ini sesuai dengan PSAK No. 16 paragraf 12 tahun 2015.

2.3.4 Depresiasi Aset Tetap

Dalam perhitungan depresiasi aset tetap, PT. Angkasa Pura 1 (Persero) menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Dalam menentukan umur manfaat, perusahaan mengelompokkan aset tetap berdasarkan jenisnya. Daftar umur manfaat aset tetap tersebut disajikan dalam lampiran. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 16 paragraf 62 tahun 2015.

Jumlah yang dapat disusutkan adalah biaya perolehan suatu aset, atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya perolehan dalam laporan keuangan, dikurangi nilai sisanya. Depresiasi aset dimulai ketika aset siap untuk digunakan. Beban penyusutan untuk satu periode diakui dalam laporan laba rugi. Depresiasi diberlakukan untuk seluruh aset tetap kecuali tanah. Perlakuan akuntansi ini telah sesuai dengan PSAK No. 16 Tahun 2015.

2.3.5 Revaluasi Aset Tetap

Revaluasi aset tetap menurut PSAK 16 paragraf 34 tahun 2015 menyatakan bahwa beberapa aset tetap mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan fluktuatif sehingga perlu direvaluasi secara tahunan. Revaluasi tahunan tersebut tidak perlu dilakukan untuk aset tetap yang nilai wajarnya tidak signifikan. Sebaliknya, aset tetap tersebut mungkin perlu di revaluasi setiap tiga atau lima tahun sekali.

PT. Angkasa Pura 1 (Persero) cabang Juanda menerapkan metode biaya dalam penyajian aset tetap sehingga tidak menggunakan metode revaluasi. Pelaksanaan

revaluasi aset tetap pada perusahaan dilakukan berdasarkan keputusan atau perintah dari kantor pusat. Sedangkan keputusan kantor pusat dipengaruhi oleh adanya perubahan nilai wajar yang signifikan pada aset tetap dan kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah. Revaluasi terakhir yang dilakukan oleh perusahaan adalah pada tahun 1993. Namun rencana revaluasi aset tetap untuk gedung akan dilakukan kembali pada tahun ini. Alasan dilakukannya revaluasi ini adalah karena dipengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah yang menyarankan perusahaan BUMN untuk merevaluasi aset tetap yang dimilikinya. Hal ini tidak bertentangan dengan PSAK No. 16 Tahun 2015.

2.3.6 Penurunan Nilai

Kebijakan akuntansi PT. Angkasa Pura 1 (Persero) menyatakan bahwa pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, perusahaan harus menilai kembali ada tidaknya indikasi penurunan nilai aset. Kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan telah sesuai dengan PSAK No. 48 tahun 2015. Namun penurunan nilai aset pada PT. Angkasa Pura 1 (Persero) selama ini belum pernah terjadi.

2.3.7 Penghentian Pengakuan Aset Tetap

Setiap tahun, perusahaan melakukan penilaian terhadap masa manfaat aset tetap. Jika aset tersebut sudah tidak memiliki umur manfaat, maka PT. Angkasa Pura 1 (Persero) Cabang Juanda akan mengajukan usulan ke kantor pusat untuk penghapusan aset. Jika disetujui, maka aset tetap tersebut dihapus dari daftar aset tetap berikut akumulasi depresiasinya. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 16 paragraf 67 tahun 2015.

Pelepasan aset tetap dilakukan dengan cara dijual atau dilelang. Dalam penjualan akan timbul laba atau rugi yang ditentukan dari perbedaan antara jumlah netto hasil pelepasan dengan nilai tercatat dari aset tersebut. Laba atau rugi yang

terjadi diakui dalam laporan laba/rugi pada pos “pendapatan/beban lain-lain”. Kebijakan ini telah sesuai dengan PSAK No. 16 paragraf 68 tahun 2015.

2.3.8 Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap Dalam Laporan Keuangan

PT. Angkasa Pura 1 (Persero) Cabang Juanda menyajikan aset tetap dalam laporan posisi keuangan berdasarkan nilai bukunya yaitu nilai perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi depresiasi dan kerugian penurunan nilai. Sedangkan untuk tanah disajikan sebagai bagian kelompok aset tetap sebesar biaya perolehannya. Pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan telah sesuai dengan PSAK NO. 16 Paragraf 73 tahun 2015.

BAB 3

SIMPULAN DAN SARAN

3.1 Simpulan

Berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada PT Angkasa Pura 1 (Persero) Cabang Juanda mengenai perlakuan akuntansi aset tetap, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Dalam penyusunan laporan keuangan, perusahaan menggunakan pedoman akuntansi keuangan keputusan direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Juanda. Pembuatan pedoman perusahaan ini berdasarkan pada aturan yang berlaku umum yaitu, PSAK.
- 2) Perlakuan akuntansi aset tetap perusahaan yang meliputi pengakuan awal, perolehan, pengukuran setelah pengakuan, depresiasi, revaluasi, penurunan nilai, penghentian pengakuan aset tetap, penyajian dan pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan telah sesuai dengan PSAK 16 Tahun 2015.

3.2 Saran

Perlakuan akuntansi aset tetap PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Juanda telah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan PSAK 16 Tahun 2015. Perusahaan juga telah menggunakan sistem informasi akuntansi yang efektif dan efisien sehingga mampu menghasilkan informasi yang berkualitas. Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- 1) PT Angkasa Pura 1 (Persero) dalam perlakuan akuntansi, tetap berpedoman pada PSAK dan terus mengikuti perkembangannya.
- 2) Berdasarkan PSAK 16 paragraf 34 Tahun 2015 menyatakan bahwa perlunya revaluasi untuk aset tetap yang mengalami perubahan nilai wajar, maka sebaiknya tahun ini perusahaan tidak hanya melakukan revaluasi untuk gedung tetapi juga tanah yang mengalami kenaikan nilai wajar yang cukup signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

Angkasapura1.co.id. 2016. *PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Juanda Surabaya*.
<http://juanda-airport.com/struktur-organisasi>.diakses 17 April 2016.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2015. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16: Aset Tetap*. Jakarta: Salemba Empat.

Kieso, Weygandt, Warfield. 2011. *Intermediate Accounting Volume 1 IFRS Edition*.
United States of America: John Wiley & Sons, Inc.

Reeve, Warren, Duchac. 2014. *Financial & Managerial Accounting*. United States of
America: South Western Cengage Learning.

Rizal Effendi. 2013. *Accounting Principles: Prinsip-Prinsip Akuntansi Berbasis SAK
ETAP*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Rudianto. 2012. *Pengantar Akuntansi Adaptasi IFRS*. Jakarta: Penerbit Airlangga.

Lampiran 1 Surat Persetujuan Judul Praktik Kerja Lapangan

PKL PROGRAM DIPLOMA III AKUNTANSI
SEMESTER GASAL / GENAP 20 ...s/d 20 ...

NAMA MAHASISWA : RATIH SEPTANES PUTRI
NIM : 041310113072
ALAMAT : Gedung Fajar B7/01, SDA
JUMLAH SKS KUMULATIV : 102
IP KUMULATIV : 3,9

TOPIK PKL BIDANG (LINGKARI SALAH SATU) :
① AKUNTANSI KEUANGAN
2 AKUNTANSI BIAYA/MANAJEMEN
3 AUDITING
4 SISTEM AKUNTANSI
5 PERPAJAKAN
6 AKUNTANSI PEMERINTAHAN
7 LAIN-LAIN


NAMA KEL / GRUP PKL :
1 ANITA RACHMAWATI
2 ANDRAPEA PINDA L.
3
4
5
6

OBJEK PKL / PERUSAHAAN TEMPAT PKL : PT. ANGKASA PURA I (PERSERO)
CABANG JUANDA

ALAMAT OBJEK PKL : JALAN IR. HADI JUANDA
SURABAYA

DOSEN PEMBIMBING PKL : Sarti Novita
JUDUL : Analisis Perilaku Akuntansi Ase-
Tetap Berdasarkan PSAK 16 Tahun
2019 pada PT Angkasa Pura 1 (persero)
juanda surabaya

MENYETUJUI / MENGETAHUI : SURABAYA, 22 Mei, 2016
DOSEN PEMBIMBING, KETUA GRUP / MAHASISWA YBS


Ratih Septanes Putri
NIP. 197211072001012001 NIM. 041310113072

Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan



UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS VOKASI

Kampus B Jl. Srikana65 Surabaya 60286 Telp.031-5033869, 990051114, Faks. 031-99005114
Website : Vokasi.unair.ac.id

Nomor : 366 /UN3.1.14/PPd/2015
Lampiran : -
Perihal : Permohonan izin Praktek Kerja Lapangan

Kepada Yth:
Pimpinan
PT. Angkasa Pura I
Jl. Ir. Haji Juanda
Surabaya

Sehubungan dengan kegiatan kurikulum berupa Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengijinkan mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Semester Gasal Tahun Akademik 2015/2016 **Program Diploma III Program Studi Akuntansi** untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Instansi yang Bapak/Ibu/Saudara pimpin.

Adapun mahasiswa yang akan melakukan Praktek Kerja Lapangan sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM
1	Anita Rachmawati	041310113070
2	Ratih Septanes P	041310113072
3	Andradea Dinda L	041310113074

Praktek Kerja Lapangan tersebut direncanakan selama 1,5 Bulan, mulai tanggal 1 Februari – 12 Maret 2016.

Atas bantuan dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Surabaya, 8 Desember 2015

Dekan

Dr. H. Widi Hidayat, SE., M.Si., Ak, CA., CMA
NIP. 196007121985111001

Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Praktik Kerja Lapangan



BANDAR UDARA
INTERNASIONAL **Juanda**

PT. Angkasa Pura I (Persero)
Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Juanda
Surabaya 61253 A
tel : 031-2986200 fax : 031-8667506
email : sub@angkasapura1.co.id
web : juanda-airport.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : AP.I. ⁰¹¹ /DL.09/2016/SUB.SS

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama	: Ratih Septanes Putri
NIM	: 041310113072
Jurusan	: D3 Akuntansi
Universitas	: Universitas Airlangga

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan Kerja Praktek dilingkungan PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Juanda – Surabaya, terhitung mulai tanggal 11 Januari 2016 s.d. 29 Februari 2016 di Accounting Section.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, ⁰¹ Maret 2015
SHARED SERVICES DEPARTMENT HEAD,

DIDIK TJATUR PRASETYA
NIP. 8970080-D

Lampiran 4 Laporan Posisi Keuangan 2015

PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) BANDARA JUANDA SURABAYA
 LAPORAN POSISI KEUANGAN
 PERIODE : 31 DESEMBER 2015 (AUDITED)

	2015	2014
ASET		
ASET LANCAR	151.897.249.634	164.857.119.713
Kas dan Setara Kas	20.767.261.831	15.825.166.940
Investasi Jangka Pendek	0	0
Piutang Usaha	100.207.221.749	86.276.232.234
Piutang Lain - lain	37.514.361	40.605.750
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	29.668.336.211	23.390.132.157
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	0	647.873.350
Pajak Dibayar Dimuka	0	37.599.915.408
Persediaan	1.216.915.482	1.077.193.876
Aset Yang Dimiliki Untuk Dijual	0	0
Aset Lancar Lain-lain	0	0
ASET TIDAK LANCAR	2.290.289.027.102	2.323.848.813.078
Piutang Jangka Panjang	0	0
Investasi Jangka Panjang	0	0
Total Properti Investasi	59.804.836.654	59.874.553.517
Properti Investasi	77.519.473.288	77.519.473.288
Tanah Properti Investasi	218.436.200	218.436.200
Bangunan Properti Investasi	77.301.037.088	77.301.037.088
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-17.714.636.634	-17.544.919.771
Total Aset Tetap	2.230.484.190.448	2.263.874.259.561
Aset Tetap	3.264.770.667.860	3.279.088.274.159
Tanah	43.008.708.916	43.008.708.916
Bangunan Lapangan	1.097.041.780.696	1.085.429.553.923
Gedung-gedung	882.031.000.784	880.082.476.724
Alat-alat perhubungan udara	6.022.325.180	6.022.325.180
Peralatan	975.958.431.125	975.724.769.831
Kendaraan	39.025.559.398	39.025.559.398
Instalasi	216.452.688.371	217.728.099.337
Aset Dalam Penyelesaian	4.230.173.390	32.066.780.850
Aset Tidak Produktif	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-1.034.286.477.412	-1.015.214.014.598
Total Aset Tidak Berwujud	0	0
Aset Tidak Berwujud	0	0
Aset Tidak Lancar Lain	0	0
LIABILITAS DAN EKUITAS	2.049.340.240.313	2.000.765.099.316
Liabilitas Jangka Pendek	129.386.728.980	175.665.521.987
Utang Usaha	9.577.737.344	7.342.518.830
Utang Non Usaha	4.449.087	48.831.844
Beban Yang Masih Harus Dibayar	34.212.626.214	13.297.245.903
Utang Pembelian Aset Tetap dan Persediaan	43.270.561.268	26.707.072.882
Pendapatan Diterima Dimuka	6.247.711.369	10.159.905.731
Utang Pajak	5.671.182.045	85.517.652.224
Utang Bank Jangka Panjang - Bag. Jatuh Tempo Dalam Setahun	0	0
Utang Lancar lain-lain	30.402.461.653	32.592.294.573
Liabilitas Jangka Panjang	18.831.859.361	18.841.944.111
Utang Bank - Setelah dikurangi bagian yang Jatuh Tempo Dalam Setahun	0	0
Utang Jaminan	18.831.859.361	18.841.944.111
Rekening Perantara Antar Cabang	1.802.173.156.475	1.830.158.132.481
Utang Jangka Panjang Lain-lain	0	0
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	0	0
Liabilitas Pajak Tangguhan	0	0
Ekuitas	491.794.531.920	464.040.334.214
Modal Saham	0	0
Penyertaan Modal Pemerintah	0	0

Lampiran 4 (Terusan)

PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) BANDARA JUANDA SURABAYA
 LAPORAN POSISI KEUANGAN
 PERIODE : 31 DESEMBER 2015 (AUDITED)

	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya	0	0
Laba Yang Belum Direalisasi Atas Efek	0	0
Saldo Laba		
Cadangan		
Laba Tahun Berjalan	163.164.123.630	124.210.012.434
Kepentingan non Pengendali		
Jumlah Ekuitas		

Lampiran 5 Laporan Laba Rugi 2015

PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) BANDARA JUANDA SURABAYA
LAPORAN LABA RUGI
 Untuk Periode Yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (Audited)

Revisi Akun	15 2015 Per. 1 - 12	15 2014 Per. 1 - 12
PENDAPATAN USAHA		
Aeronautika		
Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U)	78.703.596.208	72.037.784.026
Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U)	604.573.540.859	542.026.063.596
Pendapatan Jasa Penerbangan (PJP)	0	0
Pemakaian Aviobridge	31.260.370.832	28.375.540.856
Pemakaian Counter dan Conveyor	24.042.303.905	22.049.835.051
Pendapatan Aeronautika	738.579.811.804	664.489.223.529
Non-Aeronautika		
Pemakaian Telepon, Listrik, Air, Layanan Data, Parkir, Anjungan, Pas dan Ruang Tunggu	66.160.868.519	56.256.900.733
Event & Promotion	4.357.210.000	4.058.960.000
Sewa-sewa	73.153.080.824	64.373.180.482
Sewa Tempat Reklame	9.614.795.890	8.324.558.190
Konsesi	138.244.537.452	115.086.252.552
Warehousing	28.619.788.196	25.518.344.270
Maintenance & Services Fee	221.473.016	181.313.915
Jasa Logistik	0	0
Jasa Regulated Agent	0	0
Trading	0	0
Jasa Lain	0	0
Pendapatan Non-Aeronautika	320.371.753.897	273.799.510.142
PENDAPATAN OPERASIONAL	1.058.951.565.701	938.288.733.671
BEBAN OPERASIONAL		
Beban Pegawai	-97.762.304.695	-68.070.005.986
Beban Pemeliharaan	-44.522.589.479	-32.613.560.441
Beban Pemakaian Persediaan	-4.090.625.280	-3.170.041.555
Beban Utilitas	-69.127.877.892	-62.955.649.304
Beban Sewa	-21.325.076.546	-19.410.892.236
Beban Pelayanan Penumpang	-114.425.415.758	-95.751.261.164
Beban Asuransi	0	0
Beban Pajak	-23.062.356.962	-21.993.476.417
Beban Umum	-25.088.562.016	-20.861.376.085
Beban Low Value Asset	-891.020.530	-553.965.500
Beban Penyusutan Bangunan Investasi	-2.036.602.342	-1.866.885.479
Beban Penyusutan Asset Tetap	-167.405.806.140	-148.333.343.326
BEBAN OPERASIONAL	-569.738.237.640	-475.580.497.498
LABA OPERASIONAL	489.213.328.061	462.708.276.178
PENDAPATAN DAN (BEBAN) NON-USAHA		
Pendapatan Non-usaha	9.990.071.211	6.172.224.567
Beban Non-usaha	-7.408.867.352	-4.840.166.531
Pendapatan (Beban) Non Operasional	2.581.203.859	1.332.058.036

Lampiran 5 (Terusan)

PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) BANDARA JUANDA SURABAYA
LAPORAN LABA RUGI
Untuk Periode Yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (Audited)

	2015	2014
LABA SEBELUM TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	491.794.531.920	464.040.334.214
Taksiran Pajak Penghasilan		
Kini	0	0
Tangguhan	0	0
Jumlah Pajak Penghasilan	0	0
LABA TAHUN BERJALAN		

Lampiran 6 Rincian Kelompok Aset Tetap

KELOMPOK ASET	UMUR EKONOMIS
Landasan, Taxiway, Apron	40 tahun
Lapangan, Jalan, Pagar	
Jalan	40 tahun
Selokan / Saluran Air	20 tahun
Taman	20 tahun
Pagar	20 tahun
Tempat Parkir Kendaraan	40 tahun
Lain-lain Bangunan Lapangan	20 tahun
Overlay	6 tahun
Gedung-Gedung	
Terminal	40 tahun
Hanggar	40 tahun
Gudang	40 tahun
Kantor	40 tahun
Pertokoan (di luar terminal)	40 tahun
Perumahan	40 tahun
Gedung-gedung Lain	20 tahun
Alat-Alat Perhubungan Udara	
Alat-alat Telekomunikasi	10 tahun
Alat-alat Meteorologi	10 tahun
Rambu-rambu Udara	15 tahun
-Radar	10 tahun
Alat-alat Kerja & Alat utk Pemeliharaan Alat Perhub. Udara	10 tahun

Lampiran 6 (Terusan)

KELOMPOK ASET	UMUR EKONOMIS
Detector	
Metal Detector	15 tahun
Explosive Detector	5 tahun
Fire Alarm System	15 tahun
Flight Data Processing System (FDPS)	5 tahun
Lain - Lain Aktiva Tetap	5 tahun

Apabila terjadi perubahan umur manfaat aset tetap akan diatur lebih lanjut dan berlaku secara prospektif.

- (4) Aset tetap yang diperoleh dari serah terima dari pihak lain (telah dimanfaatkan sebelumnya) maka umur manfaat ditetapkan berdasarkan ketentuan khusus Direksi.
- (5) Aset tetap yang dibangun diatas lahan yang disewa dari pihak lain, umur manfaat ditetapkan selama masa sewa. Contoh: gedung dibangun diatas lahan Pemerintah Daerah (PEMDA) yang disewa Perusahaan, maka umur manfaat gedung sebesar masa sewa dengan Pemerintah Daerah (PEMDA).
- (6) Apabila manfaat ekonomis suatu aset tetap tidak lagi sebesar jumlah tercatatnya maka aset tersebut harus dinyatakan sebesar jumlah yang sepadan dengan nilai manfaat ekonomis yang tersisa.
- (7) Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan harus mereview ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai aset. Jika terdapat indikasi penurunan nilai aset, Perusahaan harus menaksir jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut.
- (8) Dalam mengidentifikasi terdapat atau tidaknya penurunan nilai aset tetap, paling tidak Perusahaan harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini:
 - (a) Informasi dari luar Perusahaan:
 - i. selama periode tertentu, nilai pasar aset tetap telah turun secara signifikan melebihi turunan akibat proses normal depresiasi;

Lampiran 6 (Terusan)

KELOMPOK ASET	UMUR EKONOMIS
Peralatan Ground Handling	5 tahun
Peralatan Lain-Lain	
Alat Pengangkut Kend PKP-PK dll	
Kendaraan Bermotor	5 tahun
Kendaraan PKP-PK	10 tahun
Ambulance	5 tahun
Alat-alat Besar	
-Mesin Giling & buldozer.forklif	10 tahun
-Mesin Pemotong RW Sweeper	10 tahun
-Dump Truck	5 tahun
-Salvage Equipment	10 tahun
Lain-Lain Pengangkutan	5 tahun
Alat - Alat Kantor	5 tahun
Instalasi Listrik	
Mesin Pembangkit Tenaga Listrik	20 tahun
Gardu listrik , Travo, Daya listrik	15 tahun
Approach Light	15 tahun
Vasi	15 tahun
Runway Light	15 tahun
Taxiway Light	15 tahun
Apron Light	15 tahun
Peralatan Kerja Instalasi Listrik	10 tahun
Lain-Lain Instalasi Listrik	10 tahun
Instalasi Air	
Pompa Air	10 tahun
Hydrophore	10 tahun
Hydrant	10 tahun
Deep Weel	10 tahun
Peralatan Kerja Instalasi Air	10 tahun
Lain-Lain INSTALASI air	5 tahun
Instalasi Air Condition	
AC Central	
- Besar	15 tahun
-Kecil (split)	5 tahun
AC Window	5 tahun
Instalasi Telepon	
Telepon Rumah Otomat (TRO)	20 tahun
Pesawat Telepon	20 tahun
Instalasi Telepon	20 tahun
Peralatan Kerja Instalasi Telepon	5 tahun
<i>Public Information System</i>	
<i>Public Addressing System</i>	10 tahun
<i>CCTV, Flight Progres Display</i>	15 tahun
Peralatan Perbengkelan	5 tahun
Peralatan Mekanik	
Lift	15 tahun
Escalator	15 tahun
Conveyor	15 tahun
Timbangan	10 tahun
Garbarata (<i>Avio Bridge</i>)	15 tahun
Insenerator	15 tahun
Komputer Administrasi	5 tahun

Lampiran 7 Rekapitulasi Aset Tetap

PT. ANGKASA PURA I (PERSERO)
BANDAR UDARA JUANDA
SURABAYA

Lampiran No.:
Halaman No.:
Lembaran No.:

REKAPITULASI AKTIVA TETAP PER. : 31 Desember 2015

Class	Description	Acquis.val.	Akumulasi Penyusutan		Accum.dep. Desember 2015	Book val.
			S.D Des 2014	Jan S.D Des 2015		
1000	Tanah	43.008.708.916	-	-	-	43.008.708.916
2000	Bangunan Lapangan	1.097.041.780.712	(205.009.272.508)	(45.436.318.468)	(250.445.590.976)	846.596.189.736
2100	Gedung - Gedung	882.031.000.797	(132.260.670.025)	(22.407.694.761)	(154.668.364.786)	727.362.636.011
3000	Alat Perhub. Udara	6.022.325.197	(5.716.451.825)	(85.360.000)	(5.801.811.825)	220.513.372
3100	Peralatan	976.958.431.348	(433.517.322.271)	(73.747.900.551)	(507.265.222.822)	469.693.208.526
4000	Kendaraan	39.025.559.402	(14.193.925.393)	(2.100.112.934)	(16.294.038.327)	22.731.521.075
5000	Instalasi	216.452.688.636	(75.797.644.008)	(24.013.804.668)	(99.811.448.676)	116.641.239.960
6100	Tanah Properti Inves	218.436.200	-	-	-	218.436.200
6200	Bangunan Properti In	77.301.037.087	(15.678.034.292)	(2.036.602.342)	(17.714.636.634)	59.586.400.453
8000	Aset Dalam Penyelesaian	4.230.173.390	-	-	-	4.230.173.390
		3.342.290.141.685	(882.173.320.322)	(169.827.793.724)	(1.052.001.114.046)	2.290.289.027.639

31 Des 2014 336.454.412
18.714.636.634

Lampiran 8 Contoh Biaya yang Dapat Dikaitkan

Contoh biaya yang dapat dikaitkan langsung adalah:

- i. pengurusan hak legal atas tanah di awal perolehan;
- ii. biaya persiapan tempat;
- iii. biaya pengiriman awal (*initial delivery*);
- iv. biaya simpan dan bongkar-muat (*handling cost*);
- v. biaya pemasangan (*installation cost*);
- vi. biaya pengujian (*acceptance cost*);
- vii. biaya komisi profesional seperti arsitek dan lain-lain;
- viii. biaya lisensi/sertifikasi alat pada saat perolehan awal;
- ix. suku cadang utama dan peralatan siap pakai jika digunakan lebih dari 1 (satu) tahun;
- x. suku cadang dan peralatan hanya untuk aset tetap tertentu;
- xi. biaya peralatan keamanan dan lingkungan yang merupakan persyaratan regulasi;
- xii. biaya imbalan kerja (seperti yang telah didefinisikan dalam PSAK 24: imbalan kerja) yang timbul secara langsung dari pembangunan atau akuisisi aset tetap;
- xiii. biaya pinjaman (seperti yang telah didefinisikan dalam PSAK 26: biaya pinjaman) yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian (aset yang membutuhkan waktu cukup lama agar siap digunakan atau dijual sesuai dengan maksudnya).
biaya pinjaman dapat meliputi:
 - beban bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif;
 - beban keuangan dalam sewa pembiayaan yang diakui;
 - selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Lampiran 8 (Terusan)

- (d) Yang bukan merupakan biaya perolehan aset tetap adalah:
- i. biaya pembukaan fasilitas baru, contoh: biaya peletakan batu pertama (*groundbreaking*), *kick of meeting*, dan lain-lain;
 - ii. biaya pengenalan jasa baru, contoh: biaya iklan dan aktivitas promosi);
 - iii. biaya penyelenggaraan peralatan baru, contoh: biaya *factory training*;
 - iv. biaya yang terjadi setelah aset telah mampu beroperasi sesuai maksud manajemen namun belum dipakai atau masih beroperasi dibawah kapasitas penuhnya, contoh: pekerjaan yang wanprestasi;
 - v. administrasi dan overhead umum lainnya, contoh: biaya imbalan kerja pegawai Perusahaan yang ditugaskan di proyek pengembangan bandara, perjalanan dinas, biaya *e-auction* dan lain-lain.
- (e) Harga perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah
- (a) Aset tetap yang diperoleh dari pemerintah dapat berupa:
- i. Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS);
 - ii. hibah pemerintah.
- (b) Hibah pemerintah, termasuk hibah nonmoneter pada nilai wajar, tidak boleh diakui sampai terdapat keyakinan yang memadai bahwa:
- i. Perusahaan akan mematuhi kondisi yang melekat pada hibah tersebut, dan
 - ii. hibah akan diterima.
- (c) Hibah pemerintah diakui dalam laba rugi dengan dasar yang sistematis selama periode Perusahaan mengakui sebagai beban atas biaya terkait yang dimaksudkan akan dikompensasikan dengan hibah.

Lampiran 9 Pencatatan Ayat Jurnal

General Ledger View

Data Entry View

Document Number: 5000026474 Company Code: 1000 Fiscal Year: 2015
 Document Date: 30.11.2015 Posting Date: 30.11.2015 Period: 11
 Reference: Cross-Comp.No.: Texts exist: Ledger Group:

It	PK	SG	Profit Center	Cost Center	Account	Description	Amount in LC	Amount	Curr.	Assign.	Tx	Text
1	70		1114000000		141070000	800000000473 0000	515.296.250	515.296.250	IDR			PutraSentosa; Pelataran parkir GSG:1-25%
2	96		1114000000		212110398	GR/IR - MM	515.296.250	515.296.250	IDR	450000		PutraSentosa; Pelataran parkir GSG:1-25%

Document Number: 1000002642 Company Code: 1000 Fiscal Year: 2015
 Document Date: 21.12.2015 Posting Date: 31.12.2015 Period: 12
 Reference: BA.266/ZK1004/15 Cross-Comp.No.: Texts exist: Ledger Group:

Item	PK	SG	Profit Center	Cost Center	Account	Description	Amount in LC	Amount	Curr.	Assign.	Tx	Text
10	1	75	1114000000		141070000	800000000473 0000	2.061.185.000	2.061.185.000	IDR	BA.266/	V	Pelataran Parkir GSG dan mushola
	2	70	1114000000		141020200	210000002460 0000	382.676.794	382.676.794	IDR	BA.266/	V	Pelataran Parkir GSG dan mushola
	3	70	1114000000		141050100	500000006649 0000	13.613.150	13.613.150	IDR	BA.266/	V	Pelataran Parkir GSG dan mushola
	4	70	1114000000		141050100	500000006650 0000	17.360.283	17.360.283	IDR	BA.266/	V	Pelataran Parkir GSG dan mushola
	5	70	1114000000		141020100	200000003320 0000	1.647.534.773	1.647.534.773	IDR	BA.266/	V	Pelataran Parkir GSG dan mushola

Lampiran 10 BAST (Berita Acara Serah Terima)

..... hal tidak ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja ini maka berlaku semua ketentuan-ketentuan/peraturan/peraturan administrasi dan teknis yang tercantum dalam :

a. Semua ketentuan perundang-undangan dan semua peraturan yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah setempat yang bersangkutan dalam pekerjaan ini;

b. Petunjuk-petunjuk dan peringatan-peringatan lisan maupun tertulis yang diberikan PIHAK PERTAMA termasuk peraturan-peraturan teknis pekerjaan untuk mencapai maksud dan tujuan Surat Perintah Kerja ini;

(3) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan hal-hal sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Surat Perintah Kerja ini baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa mengurangi arti Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Surat Perintah Kerja ini, maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan dan/atau memutuskan Surat Perintah Kerja ini secara sepihak, dan atas pembatalan dan/atau keputusan Surat Perintah Kerja ini PIHAK KEDUA tidak akan menuntut ganti rugi.

PASAL 3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Seluruh pekerjaan yang tercakup dalam Surat Perintah Kerja ini harus sudah selesai dan diserahkan dengan baik oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam Jangka Waktu **180 (seratus delapan puluh) hari kalender** terhitung sejak tanggal **31 Desember 2014** oleh karena itu sudah harus diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal **28 Juni 2015**.

PASAL 4

BIAYA PEKERJAAN

(1) Biaya Pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Surat Perintah Kerja ini telah disepakati oleh PARA PIHAK sebesar Rp. **145.860.000,- (seratus empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)**, biaya tersebut sudah termasuk keuntungan, pajak-pajak, dan biaya-biaya lainnya.

(2) Biaya sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini adalah merupakan harga *fixed*, dengan kata lain semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK KEDUA.



PASAL 5

CARA PEMBAYARAN

(1) Pembayaran biaya pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Surat Perintah Kerja ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara berangsur-angsur sesuai dengan prestasi fisik pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pembayaran Tahap Pertama, PIHAK PERTAMA membayar kepada PIHAK KEDUA sebesar **20% (dua puluh persen)** dari nilai kontrak atau sebesar **20% x Rp.**

lembar ke- 4 dari 14 lembar

PHK. I 	PHK. II 
---	--

Lampiran 10 (Terusan)

145.860.000,- = Rp. 29.172.000,- (dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dibayarkan setelah pekerjaan mencapai prestasi fisik 25% (dua puluh lima persen) dan telah dilaksanakan dengan baik dan benar, yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau pihak yang ditunjuk oleh PARA PIHAK yang dilengkapi dengan dokumentasi pekerjaan yang disyaratkan; -----

- b. Pembayaran Tahap Kedua, PIHAK PERTAMA membayar PIHAK KEDUA sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kontrak atau sebesar 25% x Rp. 145.860.000,- = Rp. 36.465.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dibayarkan setelah pekerjaan mencapai prestasi fisik 50% (lima puluh persen) dan telah dilaksanakan dengan baik dan benar, yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau pihak yang ditunjuk oleh PARA PIHAK yang dilengkapi dengan dokumentasi pekerjaan yang disyaratkan; -----
- c. Pembayaran Tahap Ketiga, PIHAK PERTAMA membayar PIHAK KEDUA sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kontrak atau sebesar 25% x Rp. 145.860.000,- = Rp. 36.465.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dibayarkan setelah pekerjaan mencapai prestasi fisik 75% (tujuh puluh lima persen) dan telah dilaksanakan dengan baik dan benar, yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau pihak yang ditunjuk oleh PARA PIHAK yang dilengkapi dengan dokumentasi pekerjaan yang disyaratkan; -----
- d. Pembayaran Tahap Keempat, PIHAK PERTAMA membayar PIHAK KEDUA sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kontrak atau sebesar 25% x Rp. 145.860.000,- = Rp. 36.465.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dibayarkan setelah pekerjaan mencapai prestasi fisik 100% (seratus persen) dan telah dilaksanakan dengan baik dan benar, yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST I) Pekerjaan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau pihak yang ditunjuk oleh PARA PIHAK yang dilengkapi dengan dokumentasi pekerjaan yang disyaratkan; -----
- e. Pembayaran Tahap Ketiga, PIHAK PERTAMA membayar PIHAK KEDUA sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak atau sebesar 5% x Rp. 145.860.000,- = Rp. 7.293.000,- (tujuh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dibayarkan setelah selesai masa pemeliharaan dan telah dilaksanakan dengan baik dan benar, yang dinyatakan dalam Berita Acara Masa Pemeliharaan dan Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST II) Pekerjaan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau pihak yang ditunjuk oleh PARA PIHAK; -----



(2) Dokumen Tagihan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini harus dilampirkan surat permohonan pembayaran yang mencantumkan nomor rekening atas nama perusahaan PIHAK KEDUA, kwitansi asli bermeterai, faktur pajak standar asli (lembar 1), dan photo copy kartu NPWP. -----

(3) Pembayaran sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini akan dilaksanakan sebagai berikut : -----

a. PIHAK KEDUA menerbitkan invoice/tagihan kepada PIHAK PERTAMA yang dilengkapi dengan dokumen tagihan lengkap dan benar. -----

b. Waktu pembayaran kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di PIHAK PERTAMA. -----

lembar ke- 5 dari 14 lembar

PHK. I	PHK. II
	

Lampiran 10 (Terusan)

PT. Duta Pura | AIRPORTS

**BANDAR UDARA INTERNASIONAL
Juanda SURABAYA**

Atau : 70 % x Rp. 4.823.500.000,-
= Rp. 3.376.450.000,- ✓

Telah diberikan pembayaran tahap ke,
Masing-masing terdiri dari :


I. 20 % X Rp. 4.823.500.000,- = Rp. 964.700.000,- ✓
II. 25 % X Rp. 4.823.500.000,- = Rp. 1.205.875.000,- ✓
III.


----- (+)
= Rp. 2.170.575.000,- ✓
----- (-)

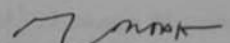
Dengan Berita Acara ini diberikan pembayaran
Tahap III sebesar -----
= Rp. 1.205.875.000,- ✓

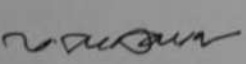
Terbilang : Satu milyar dua ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.-----

Menyetujui
PT. DUTA TRISNA ADIYASA
PT. DUTA TRISNA ADIYASA

Ir. F.S. HANDOJO
Kepala Cabang

Menyetujui
KONSULTAN PENGAWAS
PT. PRIMATA DESIGN

MA' UN

AIRPORT READINESS DEPARTMENT HEAD

YONO HADI WARDOYO

Mengetahui
GENERAL MANAGER ✓

YANUS SUPRAYOGI